



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
Jl. SOEKARNO HATTA NO. 2-4 WONOSOBO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 -2026 dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021- 2026 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, bersifat indikatif dengan mempertimbangkan kesinambungan, dan berkelanjutan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan serta melanjutkan kegiatan-kegiatan penting dan relevan yang belum terlaksana.

Merupakan harapan dan semangat bersama agar Rensta Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ini dapat terlaksana dengan optimal dalam rangka berkontribusi secara nyata turut serta mewujudkan “*Wonosobo yang Berdaya Saing Maju dan Sejahtera*”

Wonosobo, 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Drs. ONE ANDANG WARDOYO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 196809251988031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO	6
2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	6
2.2.Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.....	9
2.3.Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.....	10
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	43
3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah	45
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	52
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Daftar Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang, dan Jenis Kelamin	9
Tabel 2.2 Daftar Pegawai Sekretariat daerah Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	10
Tabel 2.4 Tabel Persentase MOU yang Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama	11
Tabel 2.5 Tabel Jumlah Selisih/Perbedaan Batas Wilayah Kabupaten	11
Tabel 2.6 Indikator Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	12
Tabel 2.7 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2016.....	13
Tabel 2.8 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2017.....	14
Tabel 2.9 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2018.....	15
Tabel 2.10 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2019.....	16
Tabel 2.11 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2020.....	17
Tabel 2.12 Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Tata kelola pemerintahan belum kapabel)	18
Tabel 2.13 Hasil Monev MCP Korsupgah KPK Kabupaten Wonosobo	18
Tabel 2.14 Indikator kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Kualitas Pelayanan Publik belum baik)	19
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020	20
Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	21
Tabel 2.17 Ketercapaian SPM Layanan Dasar 2016-2020	24
Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah	26
Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021	33
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Sekretariat Negara RI	45
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	48
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	53
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah	54
Tabel 5.1 Penjelasan Visi	55
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	57
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	59
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	8
Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Perda yang Telah Dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 272 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 yang telah disusun merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Wonosobo yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Wonosobo dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo 2021-2026. RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya menurut pasal 272 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mempunyai arti yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai konsekuensi dari apa yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan dan strategi berupa kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun harus mengacu pada RPJMD sebagai bagian dari penjabaran secara teknis dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan saling terkait satu sama lain serta saling menunjang. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, seperti halnya RPJMD, maka Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ini tetap memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati Wonosobo dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah selain sebagai wujud penjabaran dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni Dokumen RPJMD juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten

Wonosobo tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, acuan dan landasan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka turut mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu anggaran indikatif untuk kurun waktu 2022-2026;
- c. Menciptakan mekanisme pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021-2026 untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel guna mendorong penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I	PENDAHULUAN Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Setda; Sumber Daya Sekretariat Daerah, Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah.
Bab III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

	<p>BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO</p> <p>Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra serta Penentuan Isu- Isu Strategis di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>
Bab IV	<p>TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</p>
Bab V	<p>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.</p>
Bab VI	<p>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.</p>
Bab VII	<p>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Bab ini memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo.</p>
Bab VIII	<p>PENUTUP</p> <p>Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun khususnya bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.</p>

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

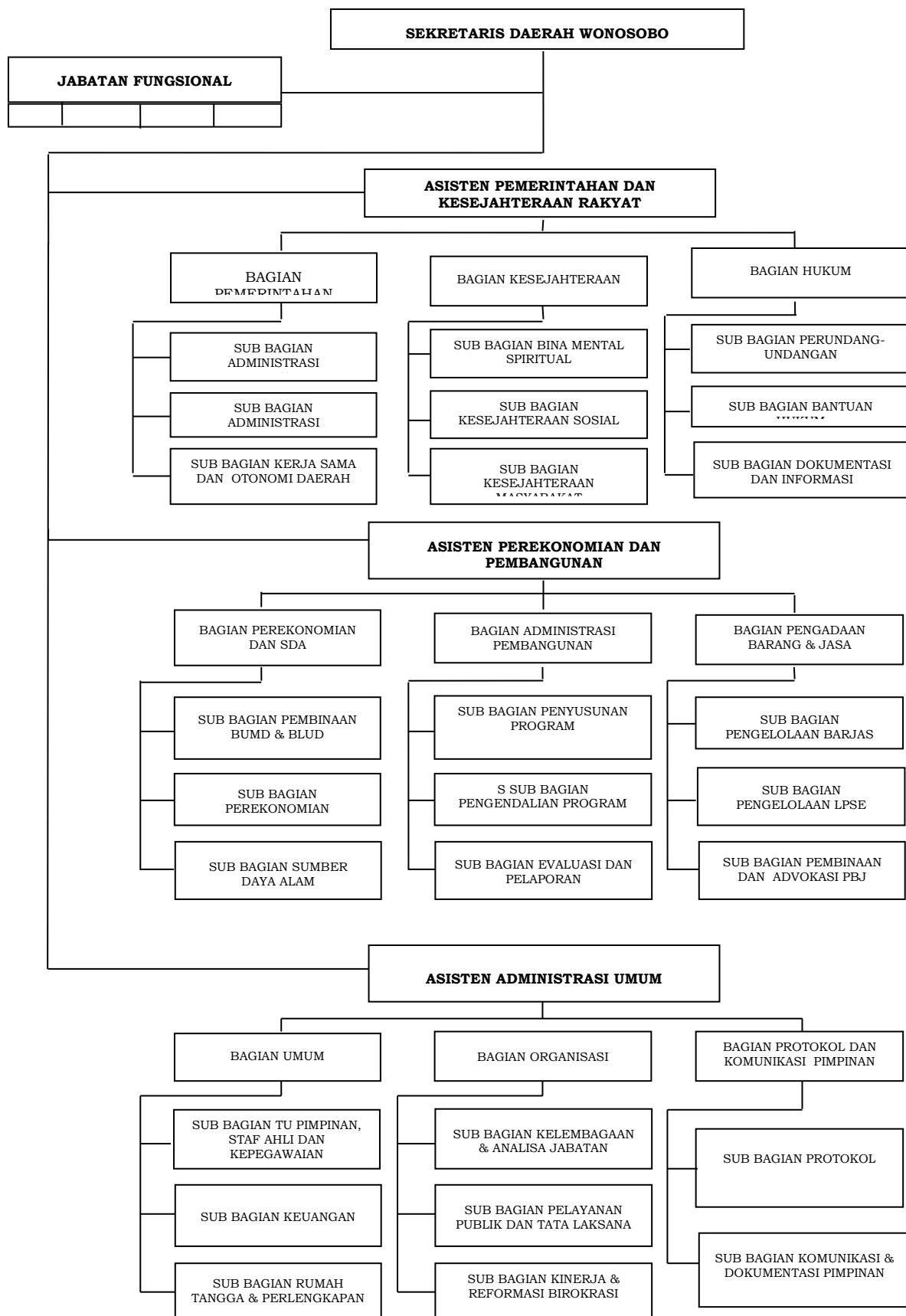
1. Perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah;
3. Penyelenggaraan kebijakan Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
7. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - 3) Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Sub Bagian Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program;

- c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini gambar struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai yang merupakan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai peran sangat vital dalam upaya pencapaian kinerja organisasi. Susunan Pegawai kondisi sampai dengan bulan September 2021 adalah sebagaimana dalam Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1.berikut.

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Pangkat, Golongan Ruang, dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1	Pembina Utama	IV / e	1	0	1	1%
2	Pembina Utama Madya	IV / d	1	0	1	1%
3	Pembina Utama Muda	IV / c	3	0	3	2%
4	Pembina Tingkat I	IV / b	10	2	12	9%
5	Pembina	IV / a	4	0	4	3%
6	Penata Tingkat I	III / d	9	9	18	13%
7	Penata	III / c	7	5	12	9%
8	Penata Muda Tingkat I	III / b	5	7	12	9%
9	Penata Muda	III / a	10	10	20	15%
10	Pengatur Tingkat I	II / d	13	4	17	13%
11	Pengatur	II / c	8	2	10	7%
12	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	13	2	15	11%
13	Pengatur Muda	II / a	6	0	6	4%
14	Juru Tingkat I	I / d	2	1	3	2%
15	Juru	I / c	2	0	2	1%
16	Juru Muda Tingkat I	I / b	0	0	0	0%
17	Juru Muda	I / a	0	0	0	0%
		Jumlah	94	42	136	100%

Sumber: Bagian Umum (September 2021)

Sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Daftar Pegawai Sekretariat daerah Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	S-2	17	3	20	15%
2	S-1 / D-IV	31	18	49	36%
3	D-III	2	4	6	4%
4	D-II	0	0	0	0%
5	D-I	0	0	0	0%
6	SLTA / SEDERAJAT	33	16	49	36%
7	SLTP / SEDERAJAT	8	1	9	7%
8	SD	3	0	3	2%

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
		94	42	136	100

Sumber: Bagian Umum (September 2021)

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari S-2 sebanyak 20 orang (15%), S-1/D-IV sebanyak 49 orang (36%), D-III sebanyak 6 orang (4%), DII dan DI tidak ada, SLTA/Sederajat sebanyak 49 orang (36%) dan SLTP Sederajat sebanyak 9 orang (7%) dan SD sebanyak 3 orang (2%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, memiliki sarana prasarana berupa aset dengan kondisi sampai dengan bulan Januari 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	33	Baik
2	Ruang rapat/pertemuan	9	Baik
3	Sarana mobilitas roda empat	46	Baik
4	Sarana mobilitas roda dua	58	Baik
5	Sarana lainnya		

Sumber : Bagian Umum (Januari 2021)

Secara umum seluruh sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik. Hal ini diukur melalui tingkat kualitas dan penggunaan/pemanfaatan yang rata-rata ada di angka 80%. Sehingga selain kebutuhan dalam pemenuhan/pengadaan aset-aset pendukung kinerja tersebut, juga diperlukan upaya pemeliharaan yang baik agar penggunaan anggaran dalam kebutuhan sarana dan prasarana kantor memenuhi prinsip efisiensi.

Kebijakan pendanaan terhadap kebutuhan anggaran dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana di dalamnya terdapat kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 369 menjelaskan bahwa kerjasama daerah dapat dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kerjasama dengan daerah lain dapat

dilaksanakan dengan daerah yang berbatasan (yang memiliki eksternalitas lintas daerah) maupun yang tidak berbatasan, untuk penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyediaan layanan publik yang lebih efektif dan efisien. Sementara kerjasama dengan pihak ketiga meliputi kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, pengelolaan aset, kerjasama investasi dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kerjasama dengan luar negeri dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan SDM aparatur serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing.

Kerjasama daerah yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 fluktuatif menyesuaikan MOU yang ada. Porsi terbesar dari ketiga jenis kerjasama tersebut adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, terdapat jenis kerjasama dengan pemerintah pusat, dan mulai dilaksanakan tahun 2020

Minimnya kerjasama yang dilakukan Kabupaten Wonosobo dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, terutama untuk proyek-proyek strategis pembangunan dalam penyediaan infrastruktur harus diupayakan secara berkesinambungan, mengingat adanya keterbatasan APBD Kabupaten Wonosobo dalam membiayai pembangunan. Skema kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha diatur dalam Peraturan Presiden No.35/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan tujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber Badan Usaha dengan pembagian resiko antara para pihak. Kerjasama didahului dengan kesepakatan/ kesepahaman antara pihak dalam bentuk MOU/nota kesepahaman sebagai pedoman dalam menjalankan kerjasama. Di Kabupaten Wonosobo MOU tidak 100% ditindaklanjuti menjadi kerjasama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Tabel Persentase MOU yang Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase MOU yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	na	na	100,00	40,00	71,43

Tabel 2.5 Tabel Jumlah Selisih/Perbedaan Batas Wilayah Kabupaten

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah selisih/perbedaan batas wilayah Kabupaten	16	16	16	16	16

Selain permasalahan terkait dengan perjanjian kerjasama juga terdapat permasalahan adanya jumlah selisih/perbedaan versi batas wilayah

Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yaitu adanya 16 titik koordinat sebagaimana tersebut pada tabel di atas, masih adanya 16 titik koordinat disebabkan karena belum adanya fasilitasi dari provinsi Namun demikian pihak Kabupaten Wonosobo tetap berupaya melakukan permohonan fasilitasi penegasan batas wilayah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Jawa Tengah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan. akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah capaiannya masih stagnan yaitu dikisaran B. Kecenderungan stagnan ini terjadi karena masih rendahnya jumlah PD yang didampingi dalam AKIP, monitoring capaian kinerja triwulanan belum terlaksana (0), masih minimnya jumlah koordinasi masing masing asisten terkait pencapaian IKU Bupati dan PD yang rata rata dalam satu tahun hanya satu, masih sedikitnya Peraturan Bupati tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati yang terdapat di OPD rata-rata dalam satu tahunnya hanya 3, jumlah kerjasama dan investasi Kabupaten yang masih fluktuatif jumlahnya dalam tiap tahun pada tahun 2016 -2020 (13,19,10,18,12) serta pelaporan PD terhadap POBL masih rendah rata-rata hanya 90 %.

Tabel 2.6 Indikator Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Data Dukung	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PD yang di dampingi AKIP	40	40	40	40	40
2	Jumlah dokumen monitoring kinerja	0	0	0	0	0
3	Persentase PD yang mengirimkan laporan POBL (termasuk Kelurahan)	75	80	90	100	100
4	jumlah koordinasi masing masing asisten terkait pencapaian IKU Bupati dan PD	0	0	1	1	1
5	Peraturan Bupati tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati yang terdapat di OPD Kabupaten	2	3	3	3	3
6	Data pemetaan kerjasama dan investasi	13	19	10	18	12

Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Belum Kapabel

Salah satu program reformasi birokrasi dari Pemerintah yaitu meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh

tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan bidang Hukum dilaksanakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka penataan, pengawasan dan penegakan produk hukum daerah. Upaya yang dilakukan meliputi penyusunan rancangan peraturan daerah, penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten, bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu yang diperkarakan di peradilan



Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Perda yang Telah Dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa jumlah peraturan daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama tahun 2016-2020 mengalami pasang surut. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah telah mempengaruhi peraturan daerah yang dikeluarkan.

Tabel 2.7 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2016

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1	1 Tahun 2016	Pemilihan Kepala Desa	10 Maret 2016
2	2 Tahun 2016	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	10 Maret 2016
3	3 Tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal pemerintah Kab. wonosobo Pada Perseroan terbatas (PT) Bimo Lukar (Apotik Cahaya)	10 Maret 2016
4	4 Tahun 2016	Pengelolaan Sampah	10 Maret 2016
5	5 Tahun 2016	Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia	6 Juni 2016
6	6 Tahun 2016	Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	6 Juni 2016

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
7	7 Tahun 2016	Pencabutan 7 (tujuh) Peraturan Daerah yang Mengatur Desa	6 Juni 2016
8	8 Tahun 2016	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	6 Juni 2016
9	9 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten wonosobo Tahun Anggaran 2015	31 Agustus 2016
10	10 Tahun 2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021	31 Agustus 2016
11	11 Tahun 2016	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten wonosobo Tahun Anggaran 2016	8 November 2016
12	12 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo	8 November 2016
13	13 Tahun 2016	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017	30 Desember 2016

Sumber : Bagian Hukum Sekda Kab. Wonosobo, 2021

Tabel 2.8 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2017

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1	1 Tahun 2017	Ruang Terbuka Hijau	10 April 2017
2	2 Tahun 2017	Penyelenggaraan Keolahragaan	10 April 2017
3	3 Tahun 2017	Penyelenggaraan Usaha Hiburan	10 April 2017
4	4 Tahun 2017	Pengelolaan Milik Daerah	10 April 2017
5	5 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kearsipan	10 April 2017
6	6 Tahun 2017	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten wonosobo Tahun Anggaran 2016	21 Agustus 2017
7	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan Perpustakaan	21 Agustus 2017
8	8 Tahun 2017	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032	21 Agustus 2017
9	9 Tahun 2017	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wonosobo	21 Agustus 2017
10	10 Tahun 2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Penyebutan Peristilahan dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo	21 Agustus 2017

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
11	11 Tahun 2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	21 Agustus 2017
12	12 Tahun 2017	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C	21 Agustus 2017
13	13 Tahun 2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah	19 September 2017
14	14 Tahun 2017	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017	30 Oktober 2017
15	15 Tahun 2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018	29 Desember 2017

Sumber : Bagian Hukum Sekda Kab. Wonosobo, 2021

Tabel 2.9 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2018

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1	1 Tahun 2018	Perlindungan Cagar Budaya	24 Januari 2018
2	2 Tahun 2018	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	24 Januari 2018
3	3 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.	24 Januari 2018
4	4 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pecalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	24 Januari 2018
5	5 Tahun 2018	Badan Permusyawaratan Desa.	16 Mei 2018
6	6 Tahun 2018	Penetapan Desa.	16 Mei 2018
7	7 Tahun 2018	Usaha Pariwisata.	2 Agustus 2018
8	8 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	2 Agustus 2018
9	9 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah	2 Agustus 2018

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
		Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.	
10	10 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Daerah	13 Agustus 2018
11	11 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Daerah	13 Agustus 2018
12	12 Tahun 2018	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017	15 Agustus 2018
13	13 Tahun 2018	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018	18 Oktober 2018
14	14 Tahun 2018	Penanggulangan Tuberculosis HIV dan AIDS	21 November 2018
15	15 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah	21 November 2018
16	16 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo	21 November 2018
17	17 Tahun 2018	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019	31 Desember 2018

Sumber : Bagian Hukum Sekda Kab. Wonosobo, 2021

Tabel 2.10 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2019

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1	1 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	25 April 2019
2	2 Tahun 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018	18 Juli 2019

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
3	3 Tahun 2019	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019	14 Agustus 2019
4	4 Tahun 2019	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	13 November 2019
5	5 Tahun 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020	31 Desember 2019
6	6 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten wonosobo	31 Desember 2019

Sumber : Bagian Hukum Sekda Kab. Wonosobo, 2021

Tabel 2.11 Peraturan Daerah yang Dikeluarkan Tahun 2020

No	No Perda	Tentang	Tgl Penetapan
1	1 Tahun 2020	Pembangunan Kepemudaan	5 Maret 2020
2	2 Tahun 2020	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Maret 2020
3	3 Tahun 2020	Bantuan hukum Bagi Masyarakat Miskin	5 Maret 2020
4	4 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019	21 Juli 2020
5	5 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020	9 Oktober 2020
6	6 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021	30 Desember 2020

Sumber : Bagian Hukum Sekda Kab. Wonosobo, 2021

Terkait dengan kelembagaannya baru bererapa perangkat daerah yang telah dievaluasi struktur kelembagaannya yaitu Dinsos PMD, Kesbangpol, Inspektorat dan Setda hal ini disebabkan karena **keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki**, Masih adanya gugatan hukum terhadap Pemerintah Daerah yaitu tahun 2017 hingga 2020 berjumlah (1,2,2,1), belum adanya kebijakan teknis yang mengatur penyederhanaan birokrasi (0), sementara untuk Tata Naskah Dinas Secara Elektronik (TNDE) belum terlaksana (0), begitu juga peta proses bisnis belum dilaksanakan (0). Sedangkan pelaporan pelayanan terpadu (PATEN) dilaksanakan secara rutin tiap tahunnya baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan. Sedangkan sarana dan prasarana penunjang JDIH baru ada pada tahun 2020.

Tabel 2.12 Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Tata kelola pemerintahan belum kapabel)

No	Data Dukung	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelaporan Kecamatan dan kelurahan (PATEN)	2	2	2	2	2
2	Jumlah PD yang telah dievaluasi struktur kelembagaannya: Dinsos PMD, Badan Kesbangpol, Inspektorat, Setda					
3	Jumlah kebijakan teknis yang mengatur penyederhanaan birokrasi	0	0	0	0	0
4	jumlah gugatan terhadap pemerintah daerah	na	1	2	2	1
5	Jumlah sarana dan prasarana penunjang JDIH	0	0	0	0	1
6	Jumlah peta proses bisnis	0	0	0	0	0
7	Pelaksanaan TNDE	0	0	0	0	0

Dalam rangka mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan dan aset daerah, ada 8 area intervensi yang dilakukan KPK, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan (pelayanan terpadu satu pintu), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa. Berdasarkan hasil Monev Capaian Korsupgah KPK Tahun 2019, hasil capaian MCP Kabupaten Wonosobo sebesar 79 % dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 71. Penurunan nilai MCP terbesar terjadi pada unsur penilaian optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.

Tabel 2.13 Hasil Monev MCP Korsupgah KPK Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2020

No	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian	Capaian MCP Tahun 2019 (%)	Capaian MCP Tahun 2020 (%)
1	Perencanaan dan penganggaran APBD	15	88	82,5
2	Pengadaan barang dan jasa	15	59	59,8
3	Perizinan (pelayanan terpadu satu pintu)	15	69	73,6
4	Kapabilitas APIP	15	75	66,4
5	Kapabilitas APIP	15	93	93,8
6	Optimalisasi pendapatan daerah	10	90	39,6
7	Manajemen Aset Daerah	10	84	67,5

8	Tata Kelola Dana Desa	51	87	75,0
	Nilai MCP Korsupgah KPK	100	79	71

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020

Kualitas pelayanan Publik Belum Baik

Berdasarkan penilain dari Ombudsman, kondisi pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo masih tergolong merah (dengan nilai 4,8).

Kondisi pelayanan publik di Sekretariat Daerah juga tergolong masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya kebijakan pelayanan publik rata-rata satu tahun hanya satu kebijakan (1), tidak semua perangkat daerah dalam setiap tahunnya dilakukan survey kepuasan masyarakat yaitu tahun 2016 (36 perangkat daerah), 2017 (49 perangkat daerah), 2018 (26 perangkat daerah), 2019 (25 perangkat daerah) dan pada tahun 2020 hanya (45 perangkat daerah). IKM belum menyeluruh, belum optimalnya pembinaan inovasi pelayanan publik terlihat hanya (15 PD di tahun 2018, 2019 14 PD dan 10 PD di tahun 2020), kerjasama yang berdampak pada pelayanan publik, kesejahteraan dan ekonomi masih fluktuatif jumlahnya namun di tahun 2019 ada peningkatan yaitu sebanyak 8 bentuk kerjasama dari tahun 2018 dan di tahun 2020 juga ada peningkatan yaitu sebanyak 2 bentuk kerjasama. Sementara jumlah kanal media informasi baru ada di tahun 2020 hanya berjumlah 2 serta tidak adanya sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. **Mendasar pada hal ini mengharuskan kita untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik**

Tabel 2.14 Indikator kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo (Kualitas Pelayanan Publik belum baik)

No	Data Dukung	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kebijakan pelayanan publik	1	1	1	1	1
2	Jumlah SKM kepada PD	36	49	26	25	45
3	Jumlah pembinaan inovasi pelayanan publik	0	0	15	14	10
4	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik	0	0	0	0	0
5	Dokumen Kerjasama yang berdampak pada pelayanan publik, kesejahteraan dan ekonomi.	7	16	10	18	20
6	Jumlah Kanal/Media informasi	0	0	0	0	2

2.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2016-2021

Kondisi capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah, selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase OPD dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B) (5)	74,1	81	82	80	80
Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD	52	76,6	85,1 1	86	90
Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) kategori B semakin meningkat dari 70 persen pada tahun 2015 menjadi 80 persen pada tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur di masing-masing perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari 52 persen menjadi 90 persen. Hal ini menandakan bahwa adanya perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.16 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARG ET NSPK	TAR GET IKK	TARGET INDIKAT OR LAIN	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	201 7	201 8	201 9	202 0	202 1	2017	201 8	201 9	202 0	202 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Nilai SAKIP	-	-	-	CC	B	B	B	B	56,1 8/ CC	62,7 0/B	64,0 3/B	64,3 4/B			100 %	100 %	100 %	
2	Persentase BUMD yang berkinerja baik	-	-	-	N/A	N/A	7,89 %	9,93 %	8,39 %	N/A	N/A	7,43 %	8,15 %		N/A	N/A	98,7 3%	98,9 3%	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-			82	84	86			59,0 4	59,8 4				72	71,2 3	
4	Nilai kematangan organisasi daerah (KOD)	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	35,5	N/A	N/A	N/A	34,5 1						
5	Indeks PBJ	-	-	-					100					10/1 00					
6	Persentase ketercapaian SPM layanan dasar	-	-	-	N/A	N/A	100 %	100 %	-	N/A	N/A	83%	91%	-			83%	91%	
7	Indeks	-	-	-	N/A	N/A	76	78	80			81.8	82,0				107,	105,	100,

	Kepuasan Masyarakat											1	2				64 %	15%	21%
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	N/A	N/A	B	B	B	N/A	B/6 9,17	BB/ 71,2 2	B/7 7,74	N/A	100 %	112 %	126 %		
9	IKM Sekretariat Daerah	-	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					

Terdapat beberapa catatan atas pencapaian maupun teknis pengukuran sebagaimana berikut:

1. Nilai SAKIP secara umum mampu berkinerja sesuai target dari tahun ke tahun. Namun tuntutan standar manajemen pemerintahan yang semakin meningkat akhir-akhir ini serta semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan mengharuskan adanya evaluasi dalam penentuan target di tahun-tahun berikutnya. Apabila memungkinkan dalam 1-2 tahun ke depan semestinya Pemerintah Kabupaten Wonosobo meningkatkan target dari predikat SAKIP B menjadi BB.
2. Pencapaian Indikator Persentase BUMD Berkinerja baik berjalan terarah sesuai dengan target, terhitung tahun 2019 sampai dengan 2020 pencapaian kinerja indikator ini lebih dari 95%.
3. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator yang perlu dikaji ulang dalam penentuan targetnya. Dalam RPJMD 2016-2021 yang lalu indikator ini ditarget begitu tinggi sedangkan formulasi dan kriteria-kriteria pendukung lainnya belum dipetakan secara jelas. Sehingga Indeks Reformasi Birokrasi pada lima tahun terakhir sulit untuk mencapai target. Evaluasi terhadap indikator ini menempatkan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator tujuan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan target yang ditetapkan melihat tren pencapaian dalam 2 tahun terakhir.
4. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator dengan capaian per tahun menunjukkan kinerja baik. Tantangan ke depan adalah untuk menjaga validitas hasil IKM ini, serta membudayakan survei kepuasan masyarakat untuk dilaksanakan sepanjang tahun oleh tiap unit pelayanan publik.
5. Nilai Kematangan Organisasi Daerah (NKOD) merupakan salah satu indikator capaian kinerja tahunan, pada RPJMD tahun lalu 2016-2021 nilai kematangan organisasi terealisasi 34,51 di tahun 2020, sedangkan target yang telah ditentukan tahun 2021 yaitu 35,5 ini memacu kita untuk terus berupaya memperbaiki kinerjanya agar target yang telah ditentukan tercapai
6. Indeks PBJ
Pengadaan Barang/Jasa merupakan support system yang dapat mendukung organisasi untuk mencapai visi misi, tujuan, maupun sasaran strategis masing-masing instansi. Melalui penilaian indeks pengadaan, diharapkan celah dan ruang perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa sehingga profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
7. Persentase ketercapaian SPM layanan dasar merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar minimal Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Ada 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial.

Tabel 2.17 Ketercapaian SPM Layanan Dasar 2016-2020

No	Urusan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Urusan Pendidikan	%	na	96,28	70,21	89,53	85,98
2	Urusan Kesehatan	%	na	72,30	80,84	83,69	70,07
3	Urusan Pekerjaan Umum	%	na	na	95,44	100,00	100,00
4	Urusan Petumahan Rakyat	%	na	na	na	73,15	60,00
5	Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	na		99,63	42,73	40,40
6	Urusan Sosial	%	na	Na	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian SPM Layanan dasar urusan pendidikan mengalami puncaknya di tahun 2017 sebesar 96,28% namun pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. Penurunan di tahun 2020 lebih disebabkan karena pandemi covid sehingga banyak orang tua yang menunda memasukkan anaknya memasuki pendidikan paud.

Layanan Urusan Kesehatan yang pada tahun 2017 hanya mencapai rata-rata 72,30 sempat mengalami puncaknya di tahun 2019 namun kembali di tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu 70,07% hal ini lebih disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang sempat menghentikan adanya keengganan masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan serta keterbatasan sumber daya kesehatan yang pada saat pandemi lebih difokuskan pada penanganan pandemi covid-19. Beberapa pendekatan untuk mengoptimalkan cakupan layanan akibat pandemi telah banyak dilakukan seperti kunjungan langsung ke rumah, penjarangan siswa untuk layanan kesehatan anak sekolah melalui posyandu dan screening kesehatan mandiri keluarga dengan pantauan tenaga kesehatan namun layanan tetap belum berjalan optimal.

Capaian SPM urusan pekerjaan umum selama 5 tahun telah tercapai 100% namun bukan berarti semua penduduk sasaran layanan telah terakses karena target penerima layanan hanya dihitung berdasarkan target sasaran tahunan yang direncanakan menyesuaikan ketersediaan anggaran tahun berjalan.

Cakupan layanan SPM urusan perumahan di tahun 2020 rata-rata tercapai 60% hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan anggaran dan banyaknya cakupan yang harus dilayani.

Capaian SPM urusan trantibum sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 40,40% dari 5 indikator yang harus terpenuhi. Untuk itu, pada layanan urusan trantibum perlu upaya keras agar dapat memenuhi target kinerja.

Capaian layanan sosial selama 5 tahun telah tercapai 100% namun bukan berarti semua penduduk sasaran layanan telah terakses karena target penerima layanan hanya dihitung berdasarkan target sasaran tahunan yang direncanakan menyesuaikan ketersediaan anggaran tahun berjalan.

8. Nilai SAKIP Setda

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo masih belum bisa dikatakan menggembirakan hal ini bisa terlihat dari kinerjanya yang hasil capaiannya masih stagnan yaitu dikisaran B, tingginya tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintahan mengharuskan kita untuk selalu berpacu dalam perbaikan ke arah depan dengan meningkatkan target kinerjanya.

9. IKM Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dilihat dari pencapaian Renstra Sekretariat Daerah pada periode sebelumnya (2016-2021) belum bisa terukur

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021

Selain kinerja pelayanan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional, administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun Kabupaten Wonosobo. Adapun perbandingan anggaran dan realisasinya di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Uraian program	Anggaran Pada Tahun 2017-2021					Realisasi Anggaran					Ratio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun 2017 - 2021					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	keterangan	
						pada Tahun 2017-2021												
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.386.558.250	9.101.980.800	9.585.400.500	8.455.438.650		7.599.774.254	8.267.998.641	8.966.042.602	6.736.546.643		91%	91%	94%	80%		0,68%	-6%	
	753.100.000	808.800.000	933.300.000	753.300.000		673.313.232	800.631.137	909.906.782	541.964.119									Kpl Daerah
	657.093.700	814.120.000	817.229.700	626.229.700		621.239.701	778.466.648	810.771.880	622.253.739									Wkl Kpl Daerah
	263.040.000	450.864.800	471.864.800	442.704.200		250.044.450	396.877.229	435.414.652	269.172.859									Bagian Tapem
	157.284.000	306.896.000	318.870.000	345.430.000		152.887.300	228.272.780	317.365.057	221.840.972									Bagian Kesra
	149.050.000	200.610.000	268.150.000	268.150.000		146.977.901	194.385.344	259.671.084	225.050.438									Bagian Hukum
	190.250.000	201.704.000	256.664.000	255.664.000		186.558.539	199.680.333	255.507.487	253.100.891									Bagian Perekonomian
	418.610.000	460.360.000	459.460.000	413.460.000		342.207.611	412.519.032	454.450.044	234.123.942									Bagian PBJ
	233.333.000	277.500.000	278.495.000	277.995.000		228.524.157	224.343.411	233.995.140	229.268.744									Bagian Dalbang
	5.384.450.000	5.359.450.000	5.507.600.000	0		4.818.515.126	4.817.266.167	5.036.601.341	0									Bagian Humas dan Umum
	180.347.550	221.676.000	273.767.000	257.767.000		179.506.237	215.556.560	252.359.135	220.690.156									Bagian Organisasi
	0	0	0	4.528.362.000		0	0	0	3.682.456.256									
0	0	0	286.376.750		0	0	0	236.624.527										Bagian Prokompim
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.477.516.000	6.042.521.000	3.296.864.000	2.332.301.250		6.440.617.622	5.576.633.273	3.173.061.235	2.062.286.080		86%	92%	96%	88%		-703%	-580%	
	239.000.000	239.000.000	269.100.000	269.100.000		238.533.199	233.081.769	264.109.074	241.952.380									Kpl Daerah
	196.463.000	212.450.000	212.967.000	221.267.000		176.388.676	206.150.563	208.877.599	219.790.824									Wkl Kpl Daerah
	39.000.000	232.500.000	39.000.000	39.000.000		23.182.319	207.849.080	23.770.843	16.932.997									Bagian Tapem
	47.220.000	88.800.000	75.000.000	50.440.000		32.560.541	83.387.312	60.244.375	28.067.999									Bagian Kesra
	35.100.000	75.000.000	75.000.000	50.000.000		33.684.144	69.622.779	70.599.066	49.483.067									Bagian Hukum
	187.000.000	37.000.000	27.000.000	28.000.000		185.758.446	36.995.924	26.220.360	27.846.276									Bagian Perekonomian
	125.683.000	179.183.000	129.183.000	64.083.000		110.496.387	164.042.160	111.812.547	49.122.595									Bagian PBJ
	40.400.000	50.000.000	42.000.000	82.000.000		40.333.846	47.333.700	35.570.038	74.313.526									Bagian Dalbang
	6.505.000.000	4.875.000.000	2.359.614.000	0		5.539.075.682	4.475.853.818	2.310.119.068	0									Bagian Humas dan Umum
	62.650.000	53.588.000	68.000.000	59.000.000		60.604.382	52.316.168	61.738.265	53.922.000									Bagian Organisasi
0	0	0	1.412.500.000		0	0	0	1.256.734.782										Bagian Umum

	0	0	0	56.911.250		0	0	0	44.119.634									Bagian prokompim
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	145.000.000	122.500.000	124.800.000	80.000.000		138.616.000	109.647.901	122.853.200	76.040.000		96%	90%	98%	95%		-28%	-27%	
	70.000.000	70.000.000	80.000.000	80.000.000		69.566.000	69.691.878	79.520.000	76.040.000									Kpl Daerah
	75.000.000	52.500.000	44.800.000	0		69.050.000	39.956.023	43.333.200	0									Wkl Kpl Daerah
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	525.000.000	2.405.000.000	1.700.000.000	0		516.143.247	2.152.606.358	1.426.620.652	0		98%	90%	84%	0%		76%	61%	Bagian Tapem
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	150.000.000	300.000.000	418.000.000	0		144.447.257	271.375.800	414.213.400	0		96%	90%	99%	0%		13%	14%	Bagian Tapem
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	70.000.000	262.790.000	150.000.000	0		68.650.000	241.745.400	140.429.500	0		98%	92%	94%	0%		44%	37%	Bagian Tapem
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.000.000	100.000.000	210.000.000	485.000.000		97.929.000	87.800.000	112.146.390	477.573.000		93%	88%	53%	98%		79%	114%	Bagian Tapem
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	250.000.000	355.000.000	350.000.000	305.000.000		239.981.639	321.445.292	337.711.345	286.700.499		96%	91%	96%	94%		9%	8%	
	100.000.000	75.000.000	75.000.000	40.000.000		93.731.639	49.620.000	62.928.500	36.850.500							-24%	-21%	Bagian Tapem
	150.000.000	0	0	0		146.250.000	0	0	0							0%	0%	Bagian Dalbang
	0	280.000.000	275.000.000	265.000.000		0	271.825.292	274.782.845	249.849.999							0%	0%	Bagian PBJ
Program pendidikan politik masyarakat	0	200.000.000	150.000.000	100.000.000		0	176.832.000	115.571.500	93.155.000		0%	88%	77%	93%		0%	0%	Bagian Tapem
Program penataan penguasaan kepemilikan, pengguna	0	50.000.000	50.000.000	0		0	43.877.800	44.601.500	0		0%	88%	89%	0%		0%	0%	Bagian Tapem

an dan pemanfaatan tanah																		
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	0	300.000.000	50.000.000	0		0	255.344.100	47.759.600	0		0%	85%	96%	0%		0%	0%	Bagian Tapem
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	0	100.000.000	50.000.000	0		0	71.336.000	35.822.500	0		### ##	71%	72%	### #		0%	0%	
	0	50.000.000	-	0		0	21.350.000		0									Bagian Tapem
	0	50.000.000	50.000.000	0		0	49.986.000	35.822.500	0									Bagian Kesra
Program pengembangan wilayah perbatasan	0	50.000.000	0	0		0	44.014.000	0	0		0%	88%	0%	0%		0%	0%	Bagian Tapem
Program Kerjasama pembangunan	0	40.000.000	40.000.000	30.000.000		0	13.531.400	33.323.709	20.269.000		0%	34%	83%	68%		0%	0%	Bagian Tapem
Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan	195.000.000	260.000.000	300.000.000	116.839.175		194.342.861	259.350.000	271.310.000	17.129.175		100%	100%	90%	15%		-4%	-19%	Bagian Kesra
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	597.000.000	382.500.000	630.000.000	548.500.000		530.200.700	376.785.430	614.784.000	490.772.150		89%	99%	98%	89%		5%	5%	Bagian Kesra
Program peningkatan peran serta kepemudaan	530.200.000	1.215.000.000	625.000.000	145.000.000		499.908.300	1.054.161.000	616.739.000	122.175.000		94%	87%	99%	84%		1%	-4%	Bagian Kesra

Program pengembangan Nilai Budaya	325.000.000	663.000.000	910.000.000	200.000.000		299.950.000	577.572.000	905.700.000	99.921.000		92%	87%	100%	50%		21%	20%	Bagian Kesra
Program peningkatan kerukunan umat beragama	540.000.000	1.517.500.000	2.460.000.000	1.224.460.000		520.809.500	1.459.684.000	2.423.050.032	812.229.354		96%	96%	98%	66%		64%	60%	Bagian Kesra
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0	100.000.000	20.000.000	725.000.000		0	94.000.000	19.450.000	548.625.369		0%	94%	97%	76%		0%	0%	Bagian Kesra
Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	0	756.000.000	150.000.000	50.000.000		0	658.871.000	144.815.000	50.000.000		0%	87%	97%	100%		0%	0%	Bagian Kesra
program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	0	0	50.000.000	175.000.000		0	0	48.664.000	171.626.000		0%	0%	97%	98%		0%	0%	Bagian Kesra
Program penataan peraturan perundangan	550.000.000	1.650.000.000	1.448.260.000	740.000.000		523.767.656	1.351.428.319	1.308.289.090	586.788.067		95%	82%	90%	79%		46%	33%	
	550.000.000	1.650.000.000	1.235.000.000	640.000.000		523.767.656	1.351.428.319	1.100.645.263	491.777.067									Bagian Hukum
	0	0	128.260.000	100.000.000		0	0	123.753.435	93.811.000									Bagian Perekonomian
	0	0	85.000.000	1.200.000		0	0	83.890.392	1.200.000									Bagian Organisasi
Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) lainnya	680.000.000	0	0	0		668.305.300	0	0	0		98%	0%	0%	0%		0%	0%	Bagian Perekonomian

Program peningkatan ketahanan pangan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		27.897.000	43.484.900	46.109.511	49.627.872		56%	87%	92%	99%		0%	23%	Bagian Perekonomian
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	350.000.000	450.000.000	100.000.000	100.000.000		329.168.986	389.899.614	87.647.402	99.759.068		94%	87%	88%	100%		-16%	-15%	Bagian Perekonomian
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	600.000.000	180.000.000	50.000.000	0		584.761.130	178.970.000	48.651.740	0		97%	99%	97%	0%		-81%	-81%	Bagian Perekonomian
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	100.000.000	100.000.000	75.000.000	70.000.000		94.963.625	70.780.647	64.433.927	67.314.900		95%	71%	86%	96%		-11%	-10%	Bagian Perekonomian
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	960.000.000	1.006.129.000	1.200.000.000	602.640.000		786.476.895	805.995.761	1.094.444.142	536.733.860		82%	80%	91%	89%		-9%	-4%	
	190.000.000	256.129.000	300.000.000	260.000.000		172.091.580	230.713.273	283.283.326	255.225.694									Bagian Perekonomian
	170.000.000	350.000.000	300.000.000	0		156.693.062	317.752.848	284.286.155	0									Bagian PBJ
	600.000.000	400.000.000	600.000.000	342.640.000		457.692.253	257.529.640	526.874.661	281.508.166									Bagian Dalbang
Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal	0	300.000.000	250.000.000	100.000.000		0	279.033.150	226.798.540	99.872.000		0%	93%	91%	100%		0%	0%	Bagian Perekonomian
Program pengembangan pemasaran pariwisata	0	0	50.000.000	0		0	0	50.000.000	0		0%	0%	100%	0%		0%	0%	Bagian Perekonomian

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	100.000.000	0	0	0		99.122.500	0	0	0		99%	0%	0%	0%		0%	0%	Bagian PBJ
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	0	0	0	50.000.000		0	0	0	400.000		0%	0%	0%	1%		0%	0%	Bagian PBJ
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100.000.000	200.000.000	150.000.000	175.000.000		77.415.000	144.912.984	128.617.224	114.396.408		77%	72%	86%	65%		31%	22%	Bagian Dalbang
Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	0	75.000.000	0	0		0	70.514.000	0	0		0%	94%	0%	0%		0%	0%	Bagian Dalbang
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	0	120.000.000	100.000.000	0		0	110.427.427	97.375.000	0		### ##	92%	97%	0%		0%	0%	
	0	30.000.000		0		0	27.403.000	0	0									Bagian Dalbang
	0	90.000.000	100.000.000	0		0	83.024.427	97.375.000	0									Bagian Organisasi
	300.000.000	450.000.000	400.000.000	500.000.000		296.951.000	429.303.000	438.496.000	352.923.900		99%	95%	110%	71%		21%	0%	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	300.000.000	400.000.000	400.000.000	0		296.951.000	387.803.000	394.630.000	0									Bagian Humas dan Umum
	0	50.000.000	0	100.000.000		0	41.500.000	43.866.000	0									Bagian Kesra
	0	0	0	400.000.000		0	0	0	352.923.900									Bagian Umum
Program	335.000.000	370.000.000	580.000.000	405.400.000		324.055.700	348.849.637	527.483.408	369.861.061		97%	94%	91%	91%		12%	10%	

peningkatan pelayanan publik	335.000.000	190.000.000	380.000.000	243.800.000		324.055.700	183.145.050	356.522.408	237.561.061									Bagian Organisasi
	0	50.000.000	100.000.000	40.000.000		0	37.450.000	70.961.000	31.216.000									Bagian Tapem
	0	130.000.000	100.000.000	-		0	128.254.587	100.000.000	0									Bagian Kesra
	0	0	0	50.000.000		0	0	0	36.820.000									Bagian perekonomian
	0	0	0	71.600.000		0	0	0	64.264.000									Bagian PBJ
Program penataan kelembagaan	250.000.000	550.000.000	350.000.000	305.000.000		237.038.662	477.658.846	298.219.258	279.312.500		95%	87%	85%	92%		24%	19%	Bagian Organisasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	145.000.000	75.000.000	0		0	143.805.000	62.484.241	0		0%	99%	83%	0%		0%	0%	Bagian Organisasi
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	0	50.000.000	0	0		0	46.410.000	0	0		0%	93%	0%	0%		0%	0%	Bagian Organisasi

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2021

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun 2017-2021					Realisasi Anggaran Pada tahun 2017-2020					Ratio antara realisasi dan Anggaran Pada tahun 2017-2020					Rata -Rata Pertumbuhan		Keterangan
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat					3.017.800.000												
Administrasi Tata Pemerintahan					760.000.000													Bagian pemerintahan
Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri					100.000.000													Bagian pemerintahan
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					1.618.800.000													Bagian Kesra
fasilitasi dan koordinasi hukum					539.000.000					-								Bagian Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan					1.905.000.000													Bagian Perekonomian dan SDA, PBJ, Adbang
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					580.000.000													Bagian Perekonomian dan SDA
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam					425.000.000													Bagian Perekonomian dan SDA
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					500.000.000													Bagian PBJ
Pelaksanaan Administrasi Pembnagunan	-				400.000.000													Bagian Adbang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					29.112.302.104																Bagian Umum	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.098.312.544																	
					16.080.312.544																	Bagian Umum
					18.000.000																	Bagain Hukum
Administrasi Umum Perangkat Daerah					6.012.206.400																	
					4.649.300.000																	Bagian Umum
					163.673.000																	Bagian Organisasi
					273.500.000																	Bagian Prokompim
					198.184.200																	Bagian pemerintahan
					123.820.000																	Bagian Kesra
					167.200.000																	Bagain Hukum
					145.329.200																	Bagian Perekonomian dan SDA
					144.200.000																	Bagian PBJ
					147.000.000																	Bagain Adbang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					627.000.000																	
					490.000.000																	Bagian Umum
					100.000.000																	Bagian Prokompim
					20.000.000																	Bagian PBJ
					17.000.000																	Bagain Adbang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan					2.666.177.000																	
					2.401.500.000																	Bagian Umum

Daerah				32.987.000														Bagian Organisasi
				21.500.000														Bagian Prokompim
				53.000.000														Bagian pemerintahan
				64.400.000														Bagian Kesra
				1.500.000														Bagain Hukum
				23.240.000														Bagian Perekonomian dan SDA
				51.550.000														Bagian PBJ
				16.500.000														Bagain Adbang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.610.402.160														
				2.315.367.000														Bagian Umum
				33.000.000														Bagian Organisasi
				66.000.000														Bagian Prokompim
				27.659.160														Bagian pemerintahan
				29.726.000														Bagian Kesra
				40.000.000														Bagain Hukum
				17.800.000														Bagian Perekonomian dan SDA
				35.000.000														Bagian PBJ
				45.850.000														Bagain Adbang
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				223.500.000														Bagian Umum
				223.500.000														Bagian Umum
Penataan Organisasi				684.704.000														Bagian Organisasi

					684.704.000														Bagian Organisasi
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					190.000.000														Bagian Prokompim
					190.000.000														Bagian Prokompim

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran dan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2017 sampai dengan 2020 untuk berbagai program di Sekretariat Daerah Wonosobo adalah sebagai berikut: program pelayanan administrasi perkantoran rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,88% atau rata-rata pertumbuhan realisasi -7%, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur rata-rata pertumbuhan anggarannya -703% atau realisasi -580%, program peningkatan disiplin aparatur -28% atau realisasi -27%, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur rata-rata pertumbuhannya 79% atau realisasi 114%, program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9% atau realisasi 8%, program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14% atau realisasi -19%, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial baik anggaran maupun realisasinya sama yaitu 5%, program peningkatan peran serta kepemudaan sebesar 1% atau realisasi -4%, program pengembangan nilai budaya 21% atau realisasi 20%, program peningkatan kerukunan umat beragama 64% atau realisasi 60%, program penataan peraturan perundang-undangan 46% atau realisasi 33%, program peningkatan ketahanan pangan 0% atau realisasi 23%, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah -16% atau realisasi 15%, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri -11% atau realisasi -10%, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota -9% atau realisasi -4%, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 31% atau realisasi 22%, program pengembangan wawasan kebangsaan 21% atau realisasi 0%, program peningkatan pelayanan publik 12% atau realisasi 10%, program penataan kelembagaan 24% atau realisasi 19%.

Sementara untuk program lain perkembangan pertumbuhan rata-rata anggaran dan pertumbuhan rata-rata realisasi 0% hal ini disebabkan karena program tersebut tidak setiap tahun dilaksanakan kadang dilaksanakan kadang tidak. Adapun program tersebut yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, program pengembangan data/informasi/statistik daerah, program pendidikan politik masyarakat, program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, program pengembangan wilayah perbatasan, program kerjasama pembangunan, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan (PMKS) lainnya, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, program pengembangan pemasaran pariwisata, program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, program mengintensifkan penanganan pengadaaan masyarakat, program pengembangan komunikasi informasi dan media massa, program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta program pembinaan dan pengembangan aparatur.

Sedangkan program tahun 2021 sudah disesuaikan dengan permendagri 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan Nomenklatur (KKN), dengan adanya permendagri 90 tahun 2019 program yang ada di urusan Sekretariat Daerah menjadi semakin ramping di banding tahun sebelumnya yaitu menjadi tiga program: program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan serta program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Sekretariat Daerah sebagai entitas Perangkat Daerah mempunyai tugas utama membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk itu jika mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran Bupati yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Sekretariat Daerah sebagai pendukung utama dalam pencapaian target tujuan Bupati pada Misi ke-1 yaitu “ *Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat* “ dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

Berdasarkan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 yang ditunjukkan dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 59,84 dengan kategori “CC” atau cukup baik/memadai, perlu perbaikan yang tidak mendasar. Berikut ini rekomendasi Kementerian PAN RB untuk melakukan perbaikan pada area perubahan yang sekaligus menjadi tantangan

Sekretariat Daerah pada perencanaan jangka menengah selanjutnya, antara lain:

1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Mengoptimalkan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara masif sampai ke tingkat PD, tidak hanya sebatas Pokja di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dan perubahan akan merata sampai ke tingkat PD.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala, sehingga dapat terlihat perkembangan dari rencana perubahan yg telah disusun.
 - c. Agen Perubahan yg dibentuk baik di tingkat Pemda maupun PD belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan organisasi.
2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Melakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yg tidak harmonis secara keseluruhan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan per-UU-an secara berkala.
 - b. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yg ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yg dinamis, lincah dan profesional.
4. Area Penguatan Tatalaksana
 - a. Peta proses bisnis belum sepenuhnya menggambarkan hubungan kinerja antar Perangkat Daerah hingga ke level terendah, sehingga belum terlihat keterkaitan kinerja yg efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.
 - b. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal.
 - c. Optimalisasi penerapan e-government dengan menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
5. Area Penguatan Akuntabilitas
 - a. Melakukan penyempurnaan pada IKU, mulai dari level PD sampai dengan indikator kinerja di bawahnya, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari level organisasi sampai ke individu pegawai.
 - b. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih perlu ditingkatkan.
 - c. Penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP yang

terintegrasi di seluruh PD yg merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis outcome.

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Memanfaatkan dan menindaklanjuti hasil SKM sebagai upaya untuk melakukan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dan sebagai dasar untuk melahirkan inovasi-inovasi yang menjawab permasalahan dan kebutuhan stakeholders, sehingga tercipta pelayanan publik yang prima.
 - b. Menyajikan hasil SKM secara terbuka di setiap PD.
 - c. Penerapan sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar di semua PD.

Selain 6 area perubahan sebagaimana di atas, terdapat area perubahan “penguatan sistem manajemen ASN” dan “penguatan pengawasan” yang tidak secara langsung menjadi bagian dari fungsi utama Sekretariat Daerah.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tantangan-tantangan yang ada, meliputi :

1. Optimalisasi internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara masif sampai ke tingkat PD, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala, dan peningkatan peran agen perubahan dalam menggerakkan perubahan dalam organisasi.
2. Memfokuskan sasaran penataan produk hukum daerah melalui identifikasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yg tidak harmonis secara keseluruhan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan per-UU-an secara berkala. Dan melalui peran Bagian Hukum untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yg ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan.
3. Mempersiapkan materi substansi dan administratif dalam rangka penyederhanaan birokrasi sebagai upaya mewujudkan birokrasi yg dinamis, lincah dan profesional, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
4. Penyusunan peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta optimalisasi penerapan e-government dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik penerapan tata naskah dinas secara menyeluruh di semua Perangkat Daerah mulai tahun 2022.
5. Identifikasi dan pendampingan penyusunan IKU pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, mulai dari level PD sampai dengan indikator

kinerja di bawahnya, sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari level organisasi sampai ke individu pegawai. Dilanjutkan dengan penyempurnaan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SAKIP yang terintegrasi di seluruh PD yg merupakan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sebagai langkah awal penerapan budaya kinerja berbasis *outcome*.

6. Membudayakan SKM sebagai budaya pelayanan pada tiap unit pelayanan setiap bulan, serta pemanfaatan hasil SKM sebagai upaya untuk melakukan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dan sebagai dasar untuk melahirkan inovasi-inovasi yang menjawab permasalahan dan kebutuhan stakeholders, dan menyajikan hasil SKM secara terbuka di setiap PD.

Peluang-peluang sebagaimana di atas menjadi dasar perencanaan kinerja Sekretariat Daerah dalam perumusan perencanaan jangka menengah. Keenam peluang sangat relevan untuk dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam fungsi utamanya yaitu perumusan kebijakan dan koordinator urusan pemerintahan. Melalui optimalisasi peran 3 asisten dan 9 bagian di Sekretariat Daerah, diharapkan mampu menjadi pendukung utama pencapaian peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang diukur dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan data-data capaian pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2020 yang tertuang pada BAB II maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas kinerja masih kurang
 - 1) Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel
 - 2) Kualitas pelayanan publik belum baik
-
- 1) Akuntabilitas kinerja masih rendah
Akuntabilitas kinerja yang masih rendah disebabkan oleh:
 - a. Masih minimnya pendampingan pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) perangkat daerah, monitoring kinerja perangkat daerah (triwulanan) belum berjalan dengan baik, belum seluruhnya PD melaporkan POBL yang bersumber DAK, BANKEU, BANKEU PROVINSI, APBD II.
 - b. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik yang disebabkan :
fungsi koordinasi terhadap pencapaian IKU Bupati dan Perangkat Daerah belum berjalan baik, perangkat daerah teknis belum melakukan kajian terhadap urusan pemerintahan yang dapat didelegasikan kepada camat, serta masih minimnya peta potensi kerjasama daerah dan kerjasama investasi.
 - 2) Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel
Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel disebabkan oleh:
 - a. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan
 - b. Masih terdapat tusi organisasi/kelembagaan yang tumpang tindih disebabkan karena Evaluasi kelembagaan masih bersifat parsial, evaluasi jabatan belum menyeluruh, penyederhanaan birokrasi belum berjalan, serta belum adanya sarana dan prasarana penunjang JDIH.
 - c. Penyelenggaraan tata laksana kurang terintegrasi disebabkan :
Belum tersusunnya peta proses bisnis, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)/Penerapan TNDE belum berjalan, belum adanya teknologi informasi yang terintegrasi.
 - d. Masih terdapat Selisih/Perbedaan batas wilayah dengan Kabupaten tetangga.
 - 3) Kualitas pelayanan publik belum baik

Kualitas pelayanan publik belum baik disebabkan : :

- a. kebijakan pelayanan publik belum terarah, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum menyeluruh, fasilitasi/pembinaan inovasi pelayanan publik kurang optimal, penyediaan sarana prasarana pelayanan publik belum menjadi prioritas, minimnya kerjasama daerah yang berdampak luas terhadap kualitas pelayanan publik kesejahteraan dan ekonomi daerah dan masih rendahnya tingkat investasi.
- b. Belum optimalnya fasilitasi komunikasi pimpinan yang dikarenakan :
Kurangnyanya intensitas koordinasi forum komunikasi pimpinan dengan lembaga vertikal dan Perangkat Daerah, kurangnya kanal/media informasi pimpinan, belum adanya pedoman/SOP.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Hasil identifikasi Sekretariat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

Adapun rumusan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah:

“ TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA “

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Berdaya Saing memiliki makna Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan

secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerjasama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang

Maju, *Mengandung makna* kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.

Sejahtera, *memiliki arti* Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan

Sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
- Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
- Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
- Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, kerkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
- Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Misi tersebut merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Telaahan terhadap visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Pada misi pertama ini, Sekretariat Daerah berperan

dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah (PD).

Selain telaahan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah diuraikan di atas, Sekretariat Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dalam bentuk program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka pengintegrasian dan pensinergian perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah maka perlu dilakukan penyandingan dengan tujuan dan sasaran Renstra K/L yaitu Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Sekretariat Negara RI

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan
1	Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan Pemerintahan di bidang Kesekretariatan Negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.	1	Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
		2	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokoleran yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1.	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden.
		2.	Persentase hasil analisis

		3. gugatan, dan prerogatif secara natural yang disetujui oleh Presiden 4. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang - undangan yang disetujui oleh Presiden. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan 6. Polri yang disetujui oleh Presiden Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan / atau Wakil Presiden yang 8. ditindaklanjuti. Persentase kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dan kerjasama teknik luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara
2.	Terjaminnya pemberian layanan kerumah tanggaan dan keprotokoleran yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. 2. Persentase kelancaran dukungan pelayanan keprotokoleran kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP.

Secara umum, telah ada keselarasan antar tujuan dan sasaran dari Pemerintah Pusat dengan Kabupaten Wonosobo. Lebih lanjut sasaran – sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target per tahunnya yang didukung oleh program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunannya diperlukan juga masukan hasil dari analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Tentunya diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah memiliki tiga peran utama yaitu : penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif. meskipun tidak berkaitan langsung dengan RTRW dan KLHS pada RPJMD tetapi Sekretariat Daerah berkewajiban untuk ikut mendukung pelaksanaan Koefisiensi Daerah Hijau (KDH) dan RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil telaah dari Renstra Setda pada BAB II gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten wonosobo yaitu sebagai

berikut:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Masalah pokok	masalah	Akar masalah
1	2	3
Akuntabilitas kinerja masih kurang	Akuntabilitas kinerja masih rendah	Pendampingan pengelolaan AKIP Perangkat Daerah kurang maksimal
		Kualitas monitoring kinerja Perangkat Daerah (triwulanan) belum berjalan baik
		Belum sepenuhnya PD melaporkan POBL yang bersumber dari DAK, Bankeu, Bankeu Propinsi, APBD II
	Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah belum berjalan dengan baik	Setda dalam menjalankan fungsi koordinasi terhadap pencapaian IKU Bupati dan Perangkat Daerah belum berjalan baik
		Perangkat daerah teknis belum melakukan kajian terhadap urusan pemerintahan yang dapat didelegasikan kepada camat
		potensi kerjasama daerah dan kerjasama investasi masih minim
Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel	Belum optimalnya kualitas pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan	Minimnya/terbatasnya koordinasi, antara Kecamatan dan Kelurahan serta pelaporan kepada OPD terkait
	Eksistensi kelurahan masih sangat perlu untuk diperkuat dari berbagai aspek pengalihan, personil, pedoman sarana dan prasarana serta dokumen (P3D)	Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kelurahan termasuk jabatan struktural di kelurahan yang belum terisi, sarpras gedung yang kurang representatif serta pengelolaan dokumen yang belum maksimal.
Manajemen/tata kelola pemerintahan belum kapabel	Masih terdapat Tusi Organisasi/ Kelembagaan yang tumpang tindih	Evaluasi kelembagaan masih bersifat parsial
		Pengelolaan dokumentasi hukum
	Penyelenggaraan tata laksana kurang terintegrasi	Belum tersusunnya Peta Proses Bisnis

		SPBE/Penerapan TNDE belum berjalan
		Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terintegrasi
Kualitas pelayanan publik belum baik	Kinerja pelayanan publik belum optimal	Kebijakan pelayanan publik belum terarah
		Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum menyeluruh kepada PD
		Fasilitasi/pembinaan inovasi pelayanan publik kurang optimal
		Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik belum menjadi prioritas
		Minimnya kerjasama daerah yang berdampak luas terhadap kualitas pelayanan publik, kesejahteraan, dan ekonomi daerah
	Belum optimalnya fasilitasi komunikasi pimpinan	Kurangnya intensitas koordinasi forum komunikasi pimpinan dengan lembaga vertikal dan perangkat daerah
		Kurangnya kanal/media informasi pimpinan
		Belum adanya pedoman/SOP tentang keprotokolan dan jamuan tamu daerah

Sehingga menjadi Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah **“Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik belum optimal”**

Terkait dengan adanya isu strategis tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik belum optimal serta tingginya tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintahan mengharuskan kita untuk selalu berpacu dalam perbaikan ke arah depan dengan meningkatkan target kinerjanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi Kabupaten Wonosobo “Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing Maju dan Sejahtera” Visi ini diharapkan akan menjadi cita-cita dan ruh Pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wonosobo serta memiliki keterukuran keberhasilannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang terus bergerak maju dengan kreativitas di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, maju dan sejahtera.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan lima misi pembangunan kabupaten Wonosobo sesuai RPJMD 2021-2026 yaitu:

1. mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
4. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang

Keterlibatan langsung Sekretariat Daerah ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 1 yaitu “Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”.

Selain pernyataan misi 1 sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo juga ikut mendorong 5 program unggulan Kabupaten Wonosobo yaitu:

1. **Wonosobo Maer** diwujudkan melalui:
 - a. Peningkatan jalan kabupaten prioritas pada jalan penghubung simpul pariwisata, produksi pertanian, penghubung kawasan perbatasan/pinggiran dan desa prioritas miskin dan jalur evakuasi bencana;
 - b. Pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas kabupaten : 1) Kawasan Telaga Menjer dan sekitarnya (Maron) 2). Kawasan Kalianget dan sekitarnya 3) Kawasan Koridor Candiyanan – Keseneng (Reco dan Candiyanan) 4). Kawasan Waduk Wadaslintang (Kumejing, Lubang Sewu dan Somogede) 5). Kawasan Gunung Lanang Mergolangu (Gunung Lanang);
 - c. Inisiasi Geopark Dieng;

- d. Penataan kota dan atau ibukota kecamatan meliputi: penataan ibukota kabupaten, penataan ibukota kecamatan, penataan kumuh perkotaan;
 - e. Pengelolaan sampah dan sanitasi secara tuntas meliputi : penataan TPA dan operasional pelayanan, fasilitas bank sampah, sanitasi air limbah domestik, fasilitasi TPS 3R; Pengembangan kawasan perdesaan prioritas
 - f. Pengembangan layanan publik modern yang ramah disabilitas dan kelompok rentan,
 - g. Implementasi zona integritas dan wilayah birokrasi bersih melayani menuju wilayah bebas **korupsi**
- 2. Wonosobo Sehat** diwujudkan melalui:
- a. Pengembangan Gedung Olah Raga Wonolelo menjadi area Sport Centre dan gedung multi fungsi untuk berbagai event
 - b. Mewujudkan “Kampung Aman dan Halal Pangan” melalui penyediaan makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal serta lingkungan dan tempat tinggal yang memenuhi standar bersih melalui peningkatan standarisasi dan sertifikasi halal untuk UMKM dengan target 500 sertifikat, pengangguran, pemuda (pelatihan berkompentensi melalui inkubator bisnis).
 - c. Pengembangan rumah sakit dan layanan kesehatan dasar (puskesmas dan puskesmas pembantu)
 - d. Fasilitasi jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat miskin, penduduk dengan penyakit kronis dan disabilitas
 - e. Layanan pendaftaran online puskesmas sebagai respon terhadap adaptasi kebiasaan baru
 - f. Sarana prasarana dan penanganan kegawatdaruratan (PONEK dan PONED)
- 3. Wonosobo Pinter** diimplementasikan melalui:
- a. Pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan ramah HAM melalui penyusunan rencana pengembangan sekolah inklusi dan tim konsultasi/assesment.
 - b. Pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dan kewirausahaan (enterpreunership) pesantren yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Wonosobo kolaborasi dengan BLK komunitas.
 - c. Gerakan kembali ke sekolah/pengembalian anak ke sekolah.
 - d. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pembentukan 100 wirausaha baru terutama rumah tangga miskin.
 - e. Peningkatan ketrampilan usaha bagi UMKM olahan makanan terutama UMKM informal (diversifikasi olahan, kemasan dan pemasaran).
 - f. Apresiasi terhadap pendidikan keagamaan.
 - g. Gerakan ASN Mengaji (membaca kitab suci masing-masing).
- 4. Wonosobo Aman** diimplementasikan melalui:
- a. Penataan dan penertiban fasilitas umum
 - b. Menjaga keberagaman sosial
 - c. Pariwisata yang aman dan nyaman
 - d. Investasi yang aman dan nyaman
 - e. Penegakan Perda

5. Wonosobo Makmur diimplementasikan melalui:

- a. Menurunkan biaya produksi melalui inovasi dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan konsep pertanian terpadu ramah lingkungan antara sub sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta mengoptimalkan penggunaan limbah
- b. Subsidi petani melalui subsidi input: pupuk, bibit/benih; subsidi output: fasilitasi pemasaran online dan jaminan gagal panen bagi petani. Subsidi input merupakan program untuk menjaga kualitas/mutu komoditas pertanian agar mempunyai daya saing melalui peningkatan saprodi unggul ramah lingkungan. Subsidi output merupakan program untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pemasaran produk pertanian melalui fasilitasi pemasaran luar daerah, pemasaran online, pembelian langsung oleh ASN. Sedangkan jaminan gagal panen bagi petani diperuntukkan bagi petani yang mengalami resiko gagal panen karena bencana alam, serangan hama/penyakit dan gangguan lainnya.
- c. Pengembangan Bumdes agar lebih berperan dan produktif sebagai lembaga ekonomi desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola BUMDes serta peningkatan strata BUMDes sebagai lembaga keuangan desa dan lembaga pendukung pertanian desa.
- d. Fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kredit bunga rendah dari perbankan
- e. Revitalisasi Pasar Induk Wonosobo dan Pasar Garung, Pasar Kertek, Pasar Kejajar dan pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Kaliwiro

Mendasar pada lima program unggulan Kabupaten Wonosobo pada RPJMD 2021-2026 maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ikut mendukung suksesnya program tersebut melalui penyelenggaraan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

4.1.1 Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi PD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi PD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Maka tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2016 adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2. Mewujudkan pemerintahan yang kapabel
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

4.1.2 Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Perangkat Daerah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021-2026 adalah:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

TUJUAN		SASARAN
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel

3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik
---	--	---

Keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selanjutnya disusun dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DATA BASELINE		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)
1)	(2)	(3)	(4)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	63,34	64,5	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47
2.	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Terwujudnya Pemerintahan yang kapabel	Indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa	10,00	60,00	70,00	85,00	90,00	95,00	100,00
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	35,50	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
			Persentase penerapan TNDE	NA	100	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai Ketercapaian SPM layanan dasar	90	100	100	100	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,81	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi merupakan cita-cita ideal ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen politik yang dipadukan dengan perencanaan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan kondisi isu dan lingkungan strategis nasional serta global sehingga pada taraf implementasi lebih adaptif terhadap perkembangan situasi daerah, nasional dan global. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati juga diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis daerah serta bersinergi dengan capaian target kepemimpinan sebelumnya agar dapat terwujud pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1. VISI

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada periode RPJMD sebelumnya dan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi serta perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan sangat kompetitif maka visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ditetapkan sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING,
MAJU, DAN SEJAHTERA”**

Visi ini diharapkan akan menjadi cita-cita dan ruh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Wonosobo serta memiliki keterukuran keberhasilannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang terus bergerak maju dengan kreativitas di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing, maju dan sejahtera secara merata di semua lapisan masyarakat. Deskripsi makna dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Penjelasan Visi

Unsur Visi	Penjelasan
Berdaya Saing	Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara

Unsur Visi	Penjelasan
	berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerjasama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang.
Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.
Sejahtera	Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan.

2. MISI

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Visi "**Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera**" akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang

5.1 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera				
MISI	: Mewujudkan Kehidupan Politik yang Demokratis dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan publik untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat				
TUJUAN SETDA	SASARAN SETDA		INDIKATOR SASARAN SETDA	STRATEGI SETDA	ARAH KEBIJAKAN SETDA
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kebijakan : Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Meningkatkan kualitas menejemen pemerintahan bidang perekonomian	Kebijakan: Peningkatan kualitas menejemen pemerintahan bidang

				dan pembangunan	perekonomian dan pembangunan
				Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan bidang Administrasi Umum	Kebijakan: Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan bidang Administrasi Umum
Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	1.2	Terwujudnya pemerintahan yang kapabel	Indeks tata kelola pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa	Kebijakan: Peningkatan pengelolaan pengadaan barang jasa yang mendukung efisiensi, efektivitas dan transparan
			Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	Meningkatkan kualitas evaluasi kelembagaan	Kebijakan: Peningkatan kualitas evaluasi kelembagaan
			Persentase penerapan TNDE	Mendorong penerapan manajemen pemerintahan berbasis elektronik	Kebijakan: Percepatan penerapan TNDE pada Perangkat Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.3	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase ketercapaian SPM	Mempercepat pencapaian SPM	Kebijakan: Peningkatan Tatakelola penyelenggaraan 6 (enam) Urusan Dasar Wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
			IKM	Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik	Kebijakan: Pengembangan inovasi

				untuk kepuasan masyarakat	pelayanan publik untuk kemudahan pelayanan
--	--	--	--	---------------------------	--

Terkait dengan hasil review MCP KPK pada bulan - bulan terakhir di tahun 2021 dengan hasil masih dibawah target, mengharuskan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memacu kinerjanya agar bisa menembus target yang telah ditentukan yaitu di angka 90 pada tahun 2021. Untuk itu pada renstra perangkat daerah Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 melalui fungsi Sekretariat Daerah selaku Koordinator akan memantau dan mengevaluasi rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pada rumpun **Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** yaitu Bagian Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum. **Bidang Perekonomian dan Pembangunan** yaitu Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) serta **Bidang Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** yaitu Bagian Umum, Bagian Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ada 3 Program sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
2. Program Perekonomian dan dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021–2026 terurai pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten wonosobo Tahun 2021-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 seperti pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai SAKIP	63,34	64,50	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47
2.	Indeks tata Kelola pengadaan PBJ	10	60	70	85	90	95	100	100
3.	Nilai kematangan organisasi	35,50	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	41,00
4.	Persentase penerapan TNDE	Na	100	100	100	100	100	100	100
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,81	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
6.	Persentase ketercapaian SPM layanan dasar	90	100	100	100	100	100	100	100

abel 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2021-2026

Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Capaian kinerja bidang pemerintahan dan Kesra (MCP, RB, SAKIP, SPM)	angka									Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum
	MCP			90	90	90	90	90	90	90	
	RB			62	65	67	69	71	73	73	
	SAKIP			64,50	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47	
	SPM			100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	%			100	100	100	100	100	100	100
Persentase kesepakatan Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian/rencana kerja kerjasama	%			100	100	100	100	100	100	100	Bagian Pemerintahan

	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Pemerintahan
	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%		100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan(MCP, RB, SAKIP, SPM)											Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Administrasi pembangunan, Bagian PBJ
	MCP			90	90	90	90	90	90	90	90	

	RB			62	65	67	69	71	73	73	
	SAKIP			64,50	65,76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47	
	SPM			100	100	100	100	100	100	100	
	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%		100	100	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%		100	100	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian
	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	%		100	100	100	100	100	100	100	Bagian Administrasi Pembangunan
	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	%		NA	80	80	85	85	90	90	Bagian Administrasi Pembangunan
	Indek tata Kelola	%		60	70	85	90	95	100	100	Bagian PBJ

	Pengadaan											
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN KAB/KOTA	Capaian kinerja bidang administrasi umum (MCP, RB, SAKIP, PM)										Bagian Organisasi, Bagian Prokompim	
	MCP			90	90	90	90	90	90	90		
	RB			62	65	67	69	71	73	73		
	SAKIP			64,50	65.76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47		
	SPM			100	100	100	100	100	100	100		
	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Nilai		65	68	70	71	73	73	73	73	Bagian Organisasi
	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	%		100	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Prokompim
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN KAB/KOTA	Capaian kinerja bidang penunjang urusan pemerintahan kbaupaten/Kota (MCP, RB, SAKIP, SPM)										Bagian Umum	
	MCP			90	90	90	90	90	90	90		
	RB			62	65	67	69	71	73	73		
	SAKIP			64,50	65.76	66,42	68,64	70,64	72,47	72,47		

	SPM			100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	%		100	100	100	100	100	100	100	Bagian Umum
	Persentase Pemenuhan Sarpras pendukung kinerja	%		100	100	100	100	100	100	100	Bagian Umum
	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%		100	100	100	100	100	100	100	Bagian Umum

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat Daerah maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Wonosobo 2021-2026: *"Wonosobo Yang Berdaya Saing Maju dan Sejahtera"*.

Tabel T-6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Devisi Operasional/ DO	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel					NILAI SAKIP		angka	64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47			Kabupaten Wonosobo		
1.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel					NILAI SAKIP		angka	64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47			Kabupaten Wonosobo		
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							3.607.600.000		2.934.716.529		2.940.874.561		2.960.702.916		2.977.364.787		2.977.364.787		Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo	
					Rata rata nilai capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)	Angka															Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo	
					MCP			90	90		90		90		90		90		90					
					RB			65	68		70		71		73		73		73					
					SAKIP			64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47					
					SPM			100	100		100		100		100		100		100					
					Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/ rencana kerja	(Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/ jumlah kesepakatan kerjasama) x 100 (ada pengembangan/p enyesuaian DO awal RPJMD dengan rencana kerja)	%	100	100		100		100		100		100		100		100		Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo

				persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	(Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan/ jumlah rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan) x 100	%	100	100		100									Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo		
				persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	(Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan/ jumlah rekomendasi hasil koordinasi bagian kesejahteraan rakyat) x 100	%	100	100		100									Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	Jumlah laporan yang dihasilkan	Dokumen	260.148.675	48	200.000.000	48	162.696.337	48	163.037.729	48	164.136.984	48	165.060.693	48	165.060.693	48	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
	4.01.02.2.01.02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Dokumen	100.148.675	48	100.000.000	48	81.348.169	48	81.518.865	48	82.068.492	48	82.530.347	48	82.530.347	48	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah patok batas yang dimonitoring		Lokasi		20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Laporan Rakor Batas Daerah		Laporan		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Pelaksanaan PATEN yang dimonitoring		Kelurahan		20	22.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Bimtek PATEN		Kali		1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Laporan Hasil Rakor Kewilayahan		Laporan		4	30.000.000	4	33.348.169	4	33.518.865	4	34.068.492	4	34.530.347	4	34.530.347	4	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Perbub yang diterbitkan		Dokumen		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Dana Kelurahan		Dokumen		0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
	4.01.02.2.01.03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Dokumen	160.000.000	307	100.000.000	307	81.348.169	307	81.518.865	307	82.068.492	307	82.530.347	307	82.530.347	307	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah laporan LPPD		Dokumen		1	13.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Cetak Buku LPPD		Paket		50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah laporan LKPJ		Dokumen		1	20.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Cetak Buku LKPJ		Paket		200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	20.000.000	200	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo

				Jumlah Laporan RLPPD		Dokumen		1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Cetak Buku RLPPD		Paket		50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	50	3.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Cetak Media RLPPD		Paket		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Publikasi RLPPD		Paket		3	24.000.000	3	13.348.169	3	13.518.865	3	14.068.492	3	14.530.347	3	14.530.347	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	Dokumen		15	100.000.000	15	81.348.169	15	81.518.865	15	82.068.492	15	82.530.347	15	82.530.347	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
		4.01.02.2.04.01		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam negeri		Dokumen		15	100.000.000	15	81.348.169	15	81.518.865	15	82.068.492	15	82.530.347	15	82.530.347	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah MOU/Nota kesepakatan		Dokumen		6	20.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah PKS/ Rencana Kerja		Dokumen		6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah dokumen panduan kerjasama		Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Sosialisasi		Laporan		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Aplikasi Kerjasama		1 Aplikasi		1	40.000.000	1	26.348.169	1	26.518.865	1	27.068.492	1	27.530.347	1	27.530.347	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	jumlah rekomendasi hasil koordinasi bagian kesra yang ditindaklanjuti/jumlah seluruh rekomendasi hasil koordinasi bagian kesra	%		100	2.707.600.000	100	2.202.583.012	100	2.207.204.779	100	2.222.086.488	100	2.234.591.667	100	2.234.591.667	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
		4.01.02.2.02.01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		5	2.407.600.000	5	1.958.538.506	5	1.962.648.185	5	1.975.881.012	5	1.987.000.627	5	1.987.000.627	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
						Bulan	na	12	50.000.000		0		0		0		0		0	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
				Fasilitasi Baznas Kabupaten Wonosobo		Bulan	12	12	100.000.000		0		0		0		0		0	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
				Fasilitasi Operasional Masjid Agung Jami wonosobo		Bulan	12	12	200.000.000		0		0		0		0		0	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
				Fasilitasi TPHD dan aritar Jemput Jamaah Haji dari Wonosobo-Donohudan dan Donohudan Wonosobo		paket	1	1	913.600.000		0		0		0		0		0	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
				fasilitasi Kegiatan Keagamaan		kali	12	14	200.000.000		0		0		0		0		0	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
				Hibah untuk Lembaga pendidikan Keagamaan		lembaga	0	5	944.000.000		0		0		0		0		0	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo

		4.01.02.2.02.02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi		Dokumen		6	200.000.000	6	162.696.337	6	163.037.729	6	164.136.984	6	165.060.693	6	165.060.693	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Terlaksananya pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial		Bulan	12	12	200.000.000		162.696.337		163.037.729		164.136.984		165.060.693		165.060.693	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
		4.01.02.2.02.03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan		Dokumen		6	100.000.000	6	81.348.169	6	81.518.865	6	82.068.492	6	82.530.347	6	82.530.347	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Terlaksananya pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat		Bulan	12	12	100.000.000		81.348.169		81.518.865		82.068.492		82.530.347		82.530.347	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							4.791.676.025		3.897.940.690		3.906.119.893		3.932.456.253		3.954.586.826			Bagian perekonomian, Adbang	Kabupaten Wonosobo
				Rata rata nilai capaian kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)		Angka														Bagian perekonomian, Adbang	Kabupaten Wonosobo
				MCP				90	90		90		90		90		90		90			
				RB				65	68		70		71		73		73		73			
				SAKIP				64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47			
				SPM				100	100		100		100		100		100		100			
				persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan/jumlah semua rekomendasi bidang perekonomian dan SDA x 100		%	100	100		100		100		100		100		100		Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Wonosobo
				Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP/jumlah seluruh BUMD x 100		%	100	100		100		100		100		100		100		Bagian Perekonomian dan SDA	Kabupaten Wonosobo

		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	Jumlah capaian kinerja perangkat daerah per triwulan/jumlah perangkat daerah	%	NA	80	417.896.000	80	339.950.743	85	340.664.074	85	342.960.945	90	344.891.017	90	344.891.017	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo	
		4.01.03.2.02.01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Dokumen	3	2	48.896.000	2	39.776.001	2	39.859.464	2	40.128.210	3	40.354.038	3	40.354.038	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah Renstra Setda yang tersusun		Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah Renja Setda yang tersusun		Dokumen	1	Dokumen	1	25.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.128.210	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen PK		Dokumen	1	Dokumen	1	23.896.000	1	19.776.001	1	19.859.464	1	20.000.000	1	8.354.038	8.354.038	8.354.038	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
		4.01.03.2.02.02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		laporan		4	169.000.000	4	137.478.405	4	137.766.881	4	138.695.751	4	139.476.286	4	139.476.286	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi		Perangkat Daerah		4 (DPU PR, DISPERKI MHUB, BAPPEDA, BPPKAD)	20.000.000	4 (DPU PR, DISPERKIMHUB, BAPPEDA, BPPKAD)	0	4 (DPU PR, DISPERKIMHUB, BAPPEDA, BPPKAD)	0	4 (DPU PR, DISPERKIMHUB, BAPPEDA, BPPKAD)	0	4 (DPU PR, DISPERKIMHUB, BAPPEDA, BPPKAD)	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
					Persentase kegiatan kebencanaan yang difasilitasi		Persen		100	50.000.000	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Perangkat daerah yang dimonitoring		Perangkat Daerah		48	80.000.000	48	0	48	0	0	48	0	48	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah kebijakan pengendalian Pembangunan		Dokumen		1	19.000.000	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
		4.01.03.2.02.03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		laporan	3	18	200.000.000	18	162.696.337	18	163.037.729	18	164.136.984	18	165.060.693	165.060.693	165.060.693	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah se kabupaten		laporan		16	100.000.000	16	0	16	0	0	16	0	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah peresmian pembangunan		Kegiatan		1	100.000.000	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen LKJIP setda yang tersusun		Dokumen		1	0.	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	Bagian Administrasi Pembangunan	Kabupaten Wonosobo
										0.		200.000.000		200.419.668		201.770.964		202.906.465				Bagian Organisasi	
					Rata rata nilai capaian kinerja Bidang penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)	Angka															Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					MCP			90	90			90		90		90		90		90			
					RB			65	68			70		71		73		73		73			
					SAKIP			64,50	65,76			66,42		68,64		70,64		72,47		72,47			

					Jumlah pendokumentasian Perda dan Perbup	Dokumen	10 Perda		0		0		0		0		0	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah penerbitan lembaran daerah dan berita daerah	Dokumen	10 Perda		0		0		0		0		0	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah website yang dikelola	Aplikasi	1 Aplikasi		0		0		0		0		0	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah penambahan koleksi buku perpustakaan JDIIH	Buku	20 buku Perundang undangan		0		0		0		0		0	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo	
					Penyebarluasan produk hukum	Dokumen	NA		0		0		0		0		0	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							4.791.676.025		3.897.940.690		3.906.119.893		3.932.456.253		3.954.586.826	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Rata rata nilai capaian kinerja Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Angka												Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					MCP			90	90		90		90		90		90			
					RB			65	68		70		71		73		73			
					SAKIP			64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47	
					SPM			100	100		100		100		100		100		100	
					Indeks Tata Kelola Pengadaan	Laporan hasil penilaian dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)	%	60	70		85		90		95		100	100	100	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	77,25	80,25	319.988.200		260.304.540		260.850.748		262.609.490		264.087.370		264.087.370	
					Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Pengukuran kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional PPBJ berdasarkan ketersediaan formasi JF PPBJ terhadap formasi yang sudah dihitung	Nilai	0	3	319.988.200	6	260.304.540	9	260.850.748	12	262.609.490	15	264.087.370	15	264.087.370
					Tingkat Kematangan UKPBJ	Model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri 4 domain yaitu: proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi	Nilai	71,25	71,25	319.988.200	71,25	260.304.540	71,25	260.850.748	71,25	262.609.490	71,25	264.087.370	71,25	264.087.370
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen		12	135.000.000		12	109.820.028	12	110.050.467	12	110.792.464	12	264.087.370	12	264.087.370
					Persentase pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik (online)	Persen			0		0		0		0		0		0	
					Persentase Perangkat Daerah yang perencanaan PBJnya di review	Persen			0		0		0		0		0		0	

					Persentase keberhasilan pemilihan penyedia pengadaan metode tender oleh pokja		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Persentase pelaksanaan paket pekerjaan tepat waktu		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
		4.01.03.2,03.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		dokumen	12	54.795.600	12	44.575.217	12	44.668.751	12	44.969.923	12	45.222.999	12	45.222.999	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Persentase Penanganan Keluhan Para Pengguna SPSE		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Persentase Anggaran yang diumumkan dalam RUP		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Persentase Penyedia Baru Terverifikasi		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Persentase pengguna (SPSE) yang memiliki akun aktif		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					persentase pemenuhan Standarisasi LPSE		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
		4.01.03.2,03.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		orang	200	130.192.600	200	105.909.296	200	106.131.529	200	106.847.103	200	107.448.404	200	107.448.404	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Persentase Pendampingan dan Layanan Konsultasi		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah SOP PBJ		angka			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					Prosentase Tindak Lanjut Kepatuhan Kinerja PBJ		Persen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
					cakupan penyedia terdaftar yang terintegrasi dalam data base vendor		Dokumen			0			0			0			0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabupaten Wonosobo	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						0			200.000.000		200.419.668		201.770.964		202.906.465		Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo	
					Rata rata nilai capaian kinerja Bidang Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)	Angka														Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					MCP			90	90			90		90		90		90				
					RB			65	68			70		71		73		73				73
					SAKIP			64,50	65,76			66,42		68,64		70,64		72,47				73
					SPM			100	100			100		100		100		100				100

Meningkatkan kualitas pelayanan publik				SPM		%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Kabupaten Wonosobo	
				IKM		angka	82,00	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50			Kabupaten Wonosobo	
1.3 Peningkatan kualitas pelayanan publik				Nilai Ketercapaian SPM Layanan dasar	(Jumlah nilai ketercapaian SPM urusan layanan dasar/jumlah urusan layanan dasar) x 100	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bagian pemerintahan, Protokol, Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	angka	82,00	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50			Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							28.293.726.644	33.415.386.706		33.500.593.433		33.991.504.294		34.342.316.766			Bagian Umum dan semua bagian di setda	Kabupaten Wonosobo
				Rata rata nilai capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)	Angka													Bagian Umum dan semua bagian di setda	Kabupaten Wonosobo
				MCP			90	90		90		90		90		90				
				RB			65	68		70		71		73		73				
				SAKIP			64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47				
				SPM			100	100		100		100		100		100				
				Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	(Jumlah aset perangkat daerah dalam kondisi baik/ jumlah aset perangkat daerah) x 100	%		100		100		100		100		100				Kabupaten Wonosobo
				Persentase Pemenuhan Sarpras pendukung kinerja	(Jumlah sarpras pendukung kinerja yang terpenuhi/ jumlah kebutuhan sarpras pendukung kinerja) x 100	%		100		100		100		100		100				Kabupaten Wonosobo
				cakupan pelayanan administrasi perkantoran	(Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi/ jumlah pelayanan perkantoran) x 100	%		100		100		100		100		100				Kabupaten Wonosobo

		4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	(Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu/Jumlah administrasi keuangan yang harus dilaporkan)x 100%	%	100	15.687.692.464	100	18.520.893.620	100	18.568.120.507	100	18.840.213.957	100	19.034.656.132	100	19.034.656.132	Bagian Umum, Huku	Kabupaten Wonosobo
				Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan		15.668.492.464		18.498.226.095		18.545.395.182		18.817.155.619		19.011.359.819		19.011.359.819	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan	12	15.668.492.464		18.498.226.095		18.545.395.182		18.817.155.619		19.011.359.819		19.011.359.819	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	1	19.200.000	1	22.667.525	1	22.725.325	1	23.058.338	1	23.296.313	1	23.296.313	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
				4205046828	Honorarium pengelola keuangan		Dokumen	1	19.200.000	1	22.667.525	1	22.725.325	1	23.058.338	1	23.296.313	1	23.296.313	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	(Jumlah realisasi belanja administrasi umum/jumlah anggaran belanja administrasi umum) x 100%	%	100	3.316.215.200	100	4.133.776.036	100	4.144.316.855	100	4.205.046.830	100	4.248.445.404	100	4.248.445.404	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	7	75.000.000	7	93.490.073	7	93.728.466	7	95.101.944	7	96.083.452	7	96.083.452	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					jumlah titik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket	7	75.000.000	7	93.490.073	7	93.728.466	7	95.101.944	7	96.083.452	7	96.083.452	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	9	256.369.200	9	105.372.803	9	320.387.892	9	325.082.791	9	328.437.838	9	328.437.838	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Peralatan dan perlengkapan kantor (ATK & Kertas Cover)		Paket	1	50.000.000	1	20.550.987	1	62.485.644	1	63.401.296	1	64.055.635	1	64.055.635	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					perlengkapan kantor (ATK)		Paket	1	19.334.200	1	7.946.738	1	24.162.199	1	24.516.267	1	24.769.289	1	24.769.289	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
					Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Paket	1	20.000.000	1	8.220.395	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1	25.622.254	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan ATK		Paket	1	20.000.000	1	8.220.395	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1	25.622.254	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
					Tersedianya ATK		Paket	1	13.000.000	1	5.343.257	1	16.246.267	1	16.484.337	1	16.654.465	1	16.654.465	Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					Pengadaan ATK		Paket	1	21.775.000	1	8.949.955	1	27.212.498	1	27.611.264	1	27.896.229	1	27.896.229	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					Pembelian ATK		Paket	1	25.000.000	1	10.275.494	1	31.242.822	1	31.700.648	1	32.027.817	1	32.027.817	Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, pigura dan souvenir		Paket	1	64.260.000	1	26.412.129	1	80.306.550	1	81.483.346	1	82.324.302	1	82.324.302	Bagian Prokompim	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan ATK		Paket	1	23.000.000	1	9.453.454	1	28.743.396	1	29.164.596	1	29.465.592	1	29.465.592	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo

		4.01.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5	65.000.000	5	81.024.730	5	81.231.337	5	82.421.685	5	83.272.325	5	83.272.325	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					jumlah Peralatan Rumah Tangga Setda, KDH & WKDH	Bulan		12	65.000.000	12	81.024.730	12	81.231.337	12	82.421.685	12	83.272.325	12	83.272.325	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket		2	15.000.000	2	18.698.015	2	18.745.693	2	19.020.389	2	19.216.690	2	19.216.690	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					jumlah BBM Non Kend Bermotor & Apar	Paket		2	15.000.000	2	18.698.015	2	18.745.693	2	19.020.389	2	19.216.690	2	19.216.690	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		9	194.451.200	9	242.390.093	9	243.008.170	9	246.569.162	9	249.113.902	9	249.113.902	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Paket		1	45.000.000	1	56.094.044	1	30.188.441	1	57.061.166	1	57.650.071	1	57.650.071	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Fotocopi, belanja penyediaan bahan undangan hari jadi	Paket		1	17.200.000	1	21.440.390	1	21.495.062	1	21.810.046	1	22.035.138	1	22.035.138	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
					Barang cetakan dan penggandaan	Paket		1	13.000.000	1	16.204.946	1	16.246.267	1	16.484.337	1	16.654.465	1	16.654.465	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan cetak keperluan kantor	Paket		1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1	25.622.254	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
					cetak dan penggandaan	Paket		1	15.000.000	1	18.698.015	1	18.745.693	1	19.020.389	1	19.216.690	1	19.216.690	Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Paket		1	20.751.200	1	25.867.083	1	25.933.042	1	26.313.059	1	26.584.626	1	26.584.626	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					Cetak dan fotocopy	Paket		1	15.000.000	1	18.698.015	1	18.745.693	1	19.020.389	1	19.216.690	1	19.216.690	Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket		1	28.500.000	1	35.526.228	1	35.616.817	1	36.138.739	1	36.511.712	1	36.511.712	Bagian Prokompim	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket		1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1	25.622.254	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		9	71.260.000	9	88.828.035	9	89.054.540	9	90.359.527	9	91.292.091	9	91.292.091	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					jumlah Bahan Bacaan Mass Media Nasional dan Lokal	Dokumen		1	35.000.000	1	43.628.701	1	43.739.951	1	44.380.907	1	44.838.944	1	44.838.944	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					langganan kompas dan Suara Merdeka	Dokumen		1	2.400.000	1	2.991.682	1	2.999.311	1	3.043.262	1	3.074.670	1	3.074.670	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
					Koran, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen		1	1.320.000	1	1.645.425	1	1.649.621	1	1.673.794	1	1.691.069	1	1.691.069	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan buku peraturan perundang-undangan dan langganan koran	Dokumen		1	13.820.000	1	17.227.104	1	17.271.032	1	17.524.118	1	17.704.977	1	17.704.977	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo

					bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen		1	1.980.000	1	2.468.138	1	2.474.432	1	2.510.691	1	2.536.603	1	2.536.603	Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					Bahan bacaan surat kabar najalah	Dokumen		1	2.500.000	1	3.116.336	1	3.124.282	1	3.170.065	1	3.202.782	1	3.202.782	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					Bahan bacaan (koran)	Dokumen		1	2.000.000	1	2.493.069	1	2.499.426	1	2.536.052	1	2.562.225	1	2.562.225	Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Jawa Pos, KR, Republika Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	Dokumen		1	9.240.000	1	11.517.977	1	11.547.347	1	11.716.559	1	11.837.481	1	11.837.481	Bagian Prokompim	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan koran/ surat kabar	Dokumen		1	3.000.000	1	3.739.603	1	3.749.139	1	3.804.078	1	3.843.338	1	3.843.338	bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2,06.07			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket		1	75.000.000	1	93.490.073	1	93.728.466	1	95.101.944	1	96.083.452	1	96.083.452	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Kebutuhan bahan/material Kegiatan PHBN / PHBD / PHBI dan Agenda Kegiatan Pemerintah Kabupaten	paket		1	75.000.000	1	93.490.073	1	93.728.466	1	95.101.944	1	96.083.452	1	96.083.452	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2,06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		24	900.000.000	24	1.121.880.882	24	1.124.741.594	24	1.141.223.328	24	1.153.001.429	24	1.153.001.429	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					jumlah Akomodasi Hotel dan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Laporan		24	900.000.000	24	1.121.880.882	24	1.124.741.594	24	1.141.223.328	24	1.153.001.429	24	1.153.001.429	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2,06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		9	1.664.134.800	9	2.074.401.130	9	2.079.690.697	9	2.110.166.060	9	2.131.944.224	9	2.131.944.224	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah perjalanan dinas pimpinan di dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah	Laporan		1	550.000.000	1	685.593.872	1	687.342.085	1	697.414.256	1	704.611.984	1	704.611.984	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					uang lembur, makan minum apat	Laporan		1	265.770.000	1	331.291.424	1	332.136.193	1	337.003.249	1	340.481.322	1	340.481.322	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
					Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan		1	60.000.000	1	74.792.059	1	74.982.773	1	76.081.555	1	76.866.762	1	76.866.762	Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Perjalanan dinas luar daerah, makan minum rapat	Laporan		1	140.000.000	1	174.514.804	1	174.959.803	1	177.523.629	1	179.355.778	1	179.355.778	Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
					Terselenggaranya rapat koordinasi, terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	Laporan		1	154.951.200	1	193.151.988	1	193.644.511	1	196.482.138	1	198.509.950	1	198.509.950	Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo

					Laporan Koordinasi dan/konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum rapat	Laporan		1	130.000.000	1	162.049.461	1	162.462.675	1	164.843.370	1	166.544.651	1	166.544.651	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah	Laporan		1	110.000.000	1	137.118.774	1	137.468.417	1	139.482.851	1	140.922.397	1	140.922.397	Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan		1	130.000.000	1	162.049.461	1	162.462.675	1	164.843.370	1	166.544.651	1	166.544.651	Bagian Prokompim	Kabupaten Wonosobo
					Penyelenggaraan rapat rapat dan perjalanan dinas	Laporan		1	123.413.600	1	153.839.287	1	154.231.566	1	156.491.644	1	158.106.730	1	158.106.730	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Pengadaan Barang yang terealisasi/Jumlah Rencana Pengadaan Barang) X 100	%	100	1.265.320.000	100	1.577.264.797	100	1.581.286.704	100	1.604.458.557	100	1.621.017.520	100	1.621.017.520	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	3	355.320.000	3	442.918.572	3	444.047.981	3	450.554.970	3	455.204.964	3	455.204.964	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Pengadaan Personal Computer		unit	1	50.000.000	1	62.326.716	1	62.485.644	1	63.401.296	1	64.055.635	1	64.055.635	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai		Unit	1	212.400.000	1	264.763.888	1	265.439.016	1	269.328.705	1	272.108.337	1	272.108.337	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					jumlah laptop, Led, LED TV, printer, scanner, sound mini portable, stand Bracket Mobile		Unit	1	92.920.000	1	115.827.968	1	116.123.321	1	117.824.968	1	119.040.992	1	119.040.992	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	3	600.000.000	3	747.920.588	3	749.827.729	3	760.815.552	3	768.667.619	3	768.667.619	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Revitalisasi Rmh Dinas Bupati		Unit	1		1		1		1		1		1		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Penataan Lingkungan Pendopo Kab		Unit	1		1		1		1		1		1		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Penataan Lingkungan Kantor WKDH		Unit	1		1		1		1		1		1		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	2	200.000.000	2	249.306.863	2	249.942.576	2	253.605.184	2	256.222.540	2	256.222.540	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo

					Jumlah pengadaan sarparas ged kantor PKK		Unit		1		1		1		1		1			Kabupaten Wonosobo							
					Jumlah pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor		Unit		1		1		1		1		1			Kabupaten Wonosobo							
		4.01.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit		3	100.000.000	3	124.653.431	3	124.971.288	3	126.802.592	3	128.111.270	3	128.111.270	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo					
					Jumlah Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga KDH & WKDH		Unit		3		3		3		3		3		3		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo					
		4.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi		Unit		1(bag adbang) Mebelair	10.000.000		dialihkan untuk pengadaan LCD (1)	12.465.343		dialihkan untuk pengadaaan laptop (1)	12.497.129		dialihkan Untuk pengadaaan Printer (1)	12.680.259		dialihkan Untuk pengadaan proyektor dan screen proyektor (1paket)	12.811.127		12.811.127	Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo	
					Aset pemda		Unit		1	10.000.000		1	12.465.343		1	12.497.129		1	12.680.259		1	12.811.127		12.811.127	Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo	
		4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Jumlah anggaran belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100	%		100	3.094.343.100	100	3.857.204.850	100	3.867.040.433	100	3.923.707.255	100	3.964.202.239	100	3.964.202.239	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo					
		4.01.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		9	24.400.000		9	30.415.437		9	30.492.994		9	30.939.832		9	31.259.150		31.259.150	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo	
					Jumlah administrasi surat menyurat tertangani		Laporan		1	12.500.000		1	15.581.679		1	15.621.411		1	15.850.324		1	16.013.909		1		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Materai, amplop		Laporan		1	3.400.000		1	4.238.217		1	4.249.024		1	4.311.288		1	4.355.783		1		Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan benda pos		Laporan		1	1.500.000		1	1.869.801		1	1.874.569		1	1.902.039		1	1.921.669		1		Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan jasa surat menyurat		Laporan		1	2.000.000		1	2.493.069		1	2.499.426		1	2.536.052		1	2.562.225		1		Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					Pembelian materai		Laporan		1	1.000.000		1	1.246.534		1	1.249.713		1	1.268.026		1	1.281.113		1		Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					Pembelian materai		Laporan		1	1.500.000		1	1.869.801		1	1.874.569		1	1.902.039		1	1.921.669		1		Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan administrasi keuangan, jasa surat menyurat		Laporan		1	1.500.000		1	1.869.801		1	1.874.569		1	1.902.039		1	1.921.669		1		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan materai		Laporan		1	1.000.000		1	1.246.534		1	1.249.713		1	1.268.026		1	1.281.113		1		Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan		18	545.003.648		18	679.365.748		18	681.098.080		18	691.078.752		18	698.211.094		18	698.211.094	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Rekening Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor terbayar		Laporan		18	545.003.648		18	679.365.748		18	681.098.080		18	691.078.752		18	698.211.094		18	698.211.094	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo

		4.01.01.2,08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		2	75.000.000	2	93.490.073	2	93.728.466	2	95.101.944	2	96.083.452	2	96.083.452	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan		1	55.000.000	1	68.559.387	1	68.734.209	1	69.741.426	1	70.461.198	1	70.461.198	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan LCD, penyediaan peralatan komputer lainnya, penyediaan printer	Laporan		1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1	25.622.254	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2,08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		8	2.449.939.452	8	3.053.933.592	8	3.061.702.893	8	3.106.586.726	8	3.138.648.543	8	3.138.648.543	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor dan Jasa transaksi keuangan	Laporan		1	2.196.858.500	1	2.738.459.501	1	2.745.442.367	1	2.785.673.520	1	2.814.423.321	1		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Honorarium pengelola uang dan penatausahaan, iuran forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	Laporan		1	53.000.000	1	66.066.319	1	66.234.783	1	67.205.374	1	67.898.973	1		Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
					Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	Laporan		1	74.080.952	1	92.344.449	1	92.579.920	1	93.936.567	1	94.906.048	1		Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan		1	22.000.000	1	27.423.755	1	27.493.683	1	27.896.570	1	28.184.479	1		Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					honorarium pengelola uang dan penatausahaan keuangan	Laporan		1	40.500.000	1	50.484.640	1	50.613.372	1	51.355.050	1	51.885.064	1		Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					Honor pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan	Laporan		1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1		Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Penyediaan administrasi keuangan	Laporan		1	25.500.000	1	31.786.625	1	31.867.678	1	32.334.661	1	32.668.374	1		Bagian Prokompim	Kabupaten Wonosobo
					honorarium pengelola keuangan (KPA, Bendahara)	Laporan		1	18.000.000	1	22.437.618	1	22.494.832	1	22.824.467	1	23.060.029	1			Kabupaten Wonosobo

		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Jumlah anggaran pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah X 100	%	100	1.834.659.160	100	2.286.965.596	100	2.292.797.186	100	2.326.395.368	100	2.350.405.148	2.350.405.148	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		unit	3	382.659.160	3	476.997.773	3	478.214.082	3	485.221.733	3	490.229.509	490.229.509	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Rekening yang terbyar untuk Kend Perseorangan Dinas/ Jabatan Terpeliharaan		unit	1	325.000.000	1	405.123.652	1	406.156.687	1	412.108.424	1	416.361.627		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					BBM, pelumas, pemeliharaan alat mesin/ service komputer,		unit	1	27.659.160	1	34.478.092	1	34.566.009	1	35.072.532	1	35.434.501		Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan		unit	1	30.000.000	1	37.396.029	1	37.491.386	1	38.040.778	1	38.433.381		Bagiabi Hukum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		unit	7	595.000.000	7	741.687.916	7	743.579.165	7	754.475.422	7	762.262.056	762.262.056	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Rekening yang terbyar untuk Kend Dinas Operasional Bagian Umum		Unit	1	425.000.000	1	529.777.083	1	531.127.975	1	538.911.016	1	544.472.897		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Terpeliharnya kendaraan dinas/operasional		Unit	1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254		Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas		Unit	1	13.000.000	1	16.204.946	1	16.246.267	1	16.484.337	1	16.654.465		Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas		Unit	1	17.000.000	1	21.191.083	1	21.245.119	1	21.556.441	1	21.778.916		Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					Perawatan kendaraan bermotor		Unit	1	35.000.000	1	43.628.701	1	43.739.951	1	44.380.907	1	44.838.944		Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		Unit	1	50.000.000	1	62.326.716	1	62.485.644	1	63.401.296	1	64.055.635		Bagian Prokompim	Kabupaten Wonosobo

					Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4		Unit	1	35.000.000	1	43.628.701	1	43.739.951	1	44.380.907	1	44.838.944	1		Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Unit	5	65.000.000	5	81.024.730	5	81.231.337	5	82.421.685	5	83.272.325	5	83.272.325	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan Mebelair		Unit	5	65.000.000	5	81.024.730	5	81.231.337	5	82.421.685	5	83.272.325	5	83.272.325	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	6	132.000.000	6	164.542.529	6	164.962.100	6	167.379.421	6	169.106.876	6	169.106.876	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan peralatan kantor, alat studio dan komunikasi		Unit	1	50.000.000	1	62.326.716	1	62.485.644	1	63.401.296	1	64.055.635	1		Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Terpeliharanya peralatan perkantoran		Unit	1	11.000.000	1	13.711.877	1	13.746.842	1	13.948.285	1	14.092.240	1		Bagian Kesra	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor		Unit	1	10.000.000	1	12.465.343	1	12.497.129	1	12.680.259	1	12.811.127	1		Bagian Hukum	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Unit	1	5.000.000	1	6.232.672	1	6.248.564	1	6.340.130	1	6.405.563	1		Bagian Perekonomian	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan rutin peralatan kantor		Unit	1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1		Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
					jasa service dan penggantian komponen		Unit	1	20.000.000	1	24.930.686	1	24.994.258	1	25.360.518	1	25.622.254	1		Bagian Adbang	Kabupaten Wonosobo
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Unit	1	16.000.000	1	19.944.549	1	19.995.406	1	20.288.415	1	20.497.803	1		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		Unit	5	550.000.000	5	685.593.872	5	687.342.085	5	697.414.256	5	704.611.984	5	704.611.984	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
					Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan Bangunan Ged. Kantor /Rumah Jabatan, Taman dan Ged. Fasilitas Umum/Olahraga		Unit	5	550.000.000	5	685.593.872	5	687.342.085	5	697.414.256	5	704.611.984	5	704.611.984	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo

	4.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		2	85.000.000	2	105.955.417	2	106.225.595	2	107.782.203	2	108.894.579	2	108.894.579	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Rekening yang terbayar untuk Pemeliharaan Sarana & Prasarana Ged.		Unit		1	75.000.000	1	93.490.073	1	93.728.466	1	95.101.944	1	96.083.452	1	96.083.452	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				pemeliharaan komputer dan printer		Unit		1	10.000.000	1	12.465.343	1	12.497.129	1	12.680.259	1	12.811.127	1	12.811.127	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
			Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Unit		1	25.000.000	1	31.163.358	1	31.242.828	1	31.700.648	1	32.027.817	1	32.027.817	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
				rehabilitasi ruang bidding room		Unit		1	25.000.000	1	31.163.358	1	31.242.828	1	31.700.648	1	32.027.817	1	32.027.817	Bagian PBJ	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	Jumlah pelayanan kedinasan yang dilaksanakan /jumlah pelayanan yang wajib dilaksanakan x 100	%		100	1.055.621.720	100	1.246.707.740	100	1.249.886.751	100	1.268.202.336	100	1.281.290.936	100	1.281.290.936	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.11.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang/Bulan		2	300.621.720	2	355.039.516	2	355.944.841	2	361.160.784	2	364.888.177	2	364.888.177	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Gaji dan Tunj KDH/WKDH terbayar		Orang/Bulan		2	300.621.720	2	355.039.516	2	355.944.841	2	361.160.784	2	364.888.177	2	364.888.177	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.11.02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan		Paket		10	125.000.000	10	147.627.189	10	148.003.628	10	150.172.442	10	151.722.311	10	151.722.311	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Pakaian Dinas KDH/WKDH yang tersedia		Paket		10	125.000.000	10	147.627.189	10	148.003.628	10	150.172.442	10	151.722.311	10	151.722.311	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.11.03		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang		2	30.000.000	2	35.430.525	2	35.520.871	2	36.041.386	2	36.413.355	2	36.413.355	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Medical Check Up KDH / WKDH & Keluarga		Orang		2	30.000.000	2	35.430.525	2	35.520.871	2	36.041.386	2	36.413.355	2	36.413.355	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
	4.01.01.2.11.04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Orang/Bulan		2	600.000.000	2	708.610.508	2	710.417.412	2	720.827.724	2	728.267.093	2	728.267.093	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Operasional KDH/WKDH		Orang/Bulan		2	600.000.000	2	708.610.508	2	710.417.412	2	720.827.724	2	728.267.093	2	728.267.093	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo

		4.01.01.2,12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah	%	100	1.432.795.000	100	1.786.028.131	100	1.790.582.369	100	1.816.821.197	100	1.835.571.869	100	1.835.571.869	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2,12.01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	550.000.000	1	685.593.872	1	687.342.085	1	697.414.256	1	704.611.984	1	704.611.984	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Pemenuhan Rumah Tangga KDH		Paket	1	550.000.000	1	685.593.872	1	687.342.085	1	697.414.256	1	704.611.984	1	704.611.984	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2,12.02		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	450.000.000	1	560.940.441	1	562.370.797	1	570.611.664	1	576.500.714	1	576.500.714	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Pemenuhan Rumah Tangga Wakil KDH		Paket	1	450.000.000	1	560.940.441	1	562.370.797	1	570.611.664	1	576.500.714	1	576.500.714	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
		4.01.01.2,12.03		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	1	432.795.000	1	539.493.818	1	540.869.487	1	548.795.278	1	554.459.170	1	554.459.170	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
				Pemenuhan Rumah Tangga Setda		Paket	1	432.795.000	1	539.493.818	1	540.869.487	1	548.795.278	1	554.459.170	1	554.459.170	Bagian Umum	Kabupaten Wonosobo
			Penataan Organisasi	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	Jumlah kebijakan kinerja penataan organisasi yang dipublikasikan	%	100	400.000.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	135.000.000		0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah dokumen penataan organisasi/kelembagaan perangkat daerah		dokumen	1			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah dokumen Raperbup/Raperda tentang evaluasi/penataan organisasi		dokumen	25			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi		PD	39			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah dokumen evaluasi kematangan organisasi perangkat daerah		dokumen	1			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah dokumen anjab dan ABK per jabatan		dokumen	1608			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan Anjab-ABK		dokumen	1			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	12	135.000.000		0		0		0		0		0		Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Raperbup tentang TNDE		dokumen	1			0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo

					Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan TNDE		PD	24						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi dalam penyusunan SOP		PD	10						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen Peta Proses Bisnis		dokumen	1						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah unit pelayanan/Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat		PD	80						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen laporan Survei Kepuasan Masyarakat		dokumen	1						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah inovasi yang difasilitasi pada keikutsertaannya dalam KIPP		inovasi	10						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah inovasi lomba inovasi pelayanan publik		inovasi	15						0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Dokumen		12		130.000.000			0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pengelolaan AKIP		PD	39	39					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen SAKIP Pemda yang disusun		dokumen	1	1					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah sistem aplikasi SAKIP yang dikembangkan		aplikasi	1	1					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen Raperbup yang disusun		dokumen	1	1					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen aktivitas harian yang direviu		dokumen	1	1					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah sistem aplikasi kinerja yang dikembangkan		aplikasi	1	1					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan RB		PD	39	39					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek evaluasi dalam PMPRB		PD	39	39					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Unit Pelayanan/Perangkat Daerah yang difasilitasi		unit pelayanan/PD	20	20					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah Unit Pelayanan/Perangkat Daerah yang menjadi objek evaluasi dalam PMPZI		unit pelayanan/PD	20	20					0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0		200.000.000		200.419.668		201.770.964		202.906.465		202.906.465	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo	
				kata rata nilai capaian kinerja Bidang penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)	Angka														Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo	
				MCP			90	90		90		90		90		90		90				
				RB			65	68		70		71		73		73		73				
				SAKIP			64,50	65,76		66,42		68,64		70,64		72,47		72,47				
				SPM			100	100		100		100		100		100		100				
				Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	(Jumlah kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan/ jumlah kegiatan pemerintahan daerah) x 100	%	100	100		100		100		100		100		100			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
				Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	(Jumlah nilai RB perangkat daerah/ jumlah perangkat daerah) x 100	Nilai	63	68		70		71		73		73		73			Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	nilai survei pelayanan x 25	angka	77,92	0	78,10	68.221.651	78,20	68.364.803	78,30	68.825.742	78,40	69.213.070		69.213.070			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
				Nilai layanan kehumasan	nilai survei pelayanan x 25	angka	76,76		76,90		77,00		77,10		77,20							Kabupaten Wonosobo
				Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah laporan kegiatan fasilitasi pimpinan	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					jumlah pedoman keprotokolan daerah	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
				Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	Laporan	12	0	12	14.957.831	12	14.999.709	12	15.134.554	12	15.247.865	12	15.247.865			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah laporan kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah kegiatan diskusi publik terlaksana	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah iklan ucapan	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah informasi yang akan dipublikasikan	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah kumpulan data dan informasi	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah dokumen untuk konten media	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo
					Jumlah informasi yang akan dipublikasikan kepada pihak eksternal dan internal	Laporan	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0			Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kabupaten Wonosobo

				Jumlah peserta/inovasi lomba inovasi pelayanan publik		inovasi	15		0		0		0		0		0	Bagian Organisasi	Kabupaten Wonosobo		
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							3.607.600.000		2.934.716.529		2.940.874.561		2.960.702.916		2.977.364.787	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo		
				Rata rata nilai capaian kinerja Bidang Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rata rata capaian kinerja (MCP , RB , SAKIP, SPM)	Angka												Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo		
				MCP			90	90			90		90		90		90				
				RB			65	68			70		71		73		73				
				SAKIP			64,50	65,76			66,42		68,64		70,64		72,47				
				SPM			100	100			100		100		100		100				
				Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	Capaian SPM pelayanan dasar/ target SPM pelayanan dasar x 100	%	100	100			100		100		100		100	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo		
	4.01.02.2,01	Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang dipublikasikan	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan yang dipublikasikan dalam	Dokumen	46		200.000.000	46	162.696.337	46	163.037.729	46	164.136.984	46	165.060.693	46	165.060.693	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
	4.01.02.2,01.01		Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi		Dokumen	12		200.000.000	46	162.696.337	46	163.037.729	46	164.136.984	46	165.060.693	46	165.060.693	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah penyusunan SPM yang difasilitasi		Dokumen	6		30.000.000	6	7.696.337	6	8.037.729	6	9.136.984	6	10.060.693		10.060.693	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah SPM yang dievaluasi		Dokumen	1		10.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		5.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Laporan SPM		Dokumen	15		10.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000	15	5.000.000		5.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah Laporan Hasil rakor OPD, Forkompinda, Camat dan lurah		Laporan	20		140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000	20	140.000.000		140.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo
				Jumlah laporan yang dihasilkan		Dokumen	4		10.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		5.000.000	Bagian Pemerintahan	Kabupaten Wonosobo

--	--	--

--	--	--

